djp

Edisi Desember 2021

E-MIGAZINE

KEPATUHAN PAJAK MENCIPTAKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Yon Arsal,

ADAPTIF DAN DINAMIS MENERJANG ZAMAN

Daftar Isi

E-MIGAZINE
Edisi Desember 2021

Sekapur Sirih
KEPATUHAN PAJAK MENCIPTAKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* ... 3

Editorial
MUTUALISME DALAM KEPATUHAN KOOPERATIF ... 5

Aksi KPP Migas
EDUKASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN ... 8

Pencapaian KPP Migas
***ANNUS MIRABILIS*, SEBUAH TAHUN YANG INDAH UNTUK KPP MIGAS** ... 10

Karakteristik Industri Migas
MENGENAL KONTRAK KERJA SAMA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI KONVENSIONAL DENGAN SKEMA *COST RECOVERY* (BAGIAN I) ... 15

Serba-serbi Migas
MENGETUK PINTU LANGIT DENGAN BAKTI SOSIAL ... 19

Serba-serbi Foto ... 23

Konten Spesial
KALEIDOSKOP 2021 KPP MIGAS ... 27

Reportase
MENENGOK JAMBARAN-TIUNG BIRU, PROYEK STRATEGIS YANG SEGERA DITUNTASKAN ... 36

Tokoh Inspiratif
Yon Arsal, ADAPTIF DAN DINAMIS MENERJANG ZAMAN ... 39

Olahraga dan Hobi
GOWES, CARA ASYIK UNTUK BEROLAHRAGA ... 43

Wisata
CAMPING CERIA, PILIHAN WISATA AMAN DI ERA *NEW NORMAL* ... 46

Kuliner
WARUNG NASI IBU IMAS : Keistimewaan Sambal Pedas, Tak Bikin Kantong Terkuras ... 51

Resensi Film
***RAYA AND THE LAST DRAGON*, Sebuah Kisah Naga yang Tak Biasa** ... 53

Redaksi:

Penanggungjawab:
Muh. Tunjung Nugroho

Pemimpin Redaksi:
Evie Andayani
Agus Suharjono

Redaktur Pelaksana:
Ahmad Dahlan
Tobagus Manshor
Makmun

Tim Emigazine:
Fungsional Penyuluh Pajak KPP Migas

Kontributor:
Pegawai KPP Migas

Kepatuhan Pajak Menciptakan *Good Corporate Governance*

"Bisa dibayangkan, jika seluruh wajib pajak memiliki kepatuhan tinggi yang dibuktikan dengan mencatat dan melaporkan seluruh transaksi ekonomi/ keuangannya maka *good corporate governance* niscaya akan segera terwujud."

Dalam bulan Desember, terdapat peringatan hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Peringatan yang jatuh setiap 9 Desember ini dilaksanakan sebagai komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, peringatan Hakordia merupakan bentuk perlawanan suatu unit organisasi beserta jajaran pimpinan dan pegawai terhadap praktik korupsi. Antikorupsi merupakan syarat mutlak terbentuknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik (*good corporate governance)*

Secara umum, istilah *good corporate governance* (GCG) merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Dalam bahasa sederhana, GCG dapat diartikan sebagai komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

Kebutuhan GCG timbul berkaitan dengan *principal-agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik kepentingan antara *principal* dan agennya. Konflik yang muncul karena perbedaan kepentingan tersebut harus dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan (wajib pajak), yang berlaku sebagai *principal* adalah pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan yang bertindak sebagai agen adalah wajib pajak. Pemerintah yang bertindak sebagai *principal* memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan *principal* dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Pelaporan ini tentu saja harus selaras dengan prinsip dasar dari GCG, yang dua di antaranya adalah *transparency* dan *responsibility*. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Sedangkan *responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan bahasa yang sederhana, bentuk laporan yang memenuhi prinsip *transparency* dan *responsibility* adalah laporan yang menyajikan keadaan yang sebenarnya dan tunduk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka wajib pajak (badan hukum dan orang pribadi pengusaha) harus mengungkapkan secara *full disclosure*; mencatat serta melaporkan seluruh transaksi keuangannya kepada DJP. Informasi keuangan yang disajikan harus simetris antara wajib pajak dengan DJP, sehingga tidak terjadi bias dalam penghitungan pajak.

Bisa dibayangkan, jika seluruh wajib pajak memiliki kepatuhan tinggi yang dibuktikan dengan mencatat dan melaporkan seluruh transaksi ekonomi/keuangannya maka *good corporate governance* niscaya akan segera terwujud. Dengan kata lain, kepatuhan pajak yang tinggi akan menciptakan *good corporate governance*. Inilah peran penting pajak bagi negara kita, yaitu sebagai pengampu terpenting *good corporate governance* para pelaku usaha dan penopang utama penerimaan negara.

#BayarPajaknya #NikmatiFasilitasnya
#SayNoToFreeRider
#PajakMembangunGCG

M. Tunjung Nugroho

Foto: google.com (freepik)

Dari berbagai literasi, kepatuhan pajak pada umumnya diartikan sebagai kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan penghasilan dengan benar, serta membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan secara administratif perpajakan atau disebut kepatuhan formal, yakni kepatuhan yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi perpajakan. Kedua, kepatuhan secara teknis atau disebut kepatuhan materiel, yakni kepatuhan yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar.

Kepatuhan pajak merupakan sesuatu yang sifatnya tidak menentu karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain: kekuatan yang dimiliki oleh otoritas pajak untuk mendeteksi kecurangan, etika dan norma sosial, demokrasi, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Pada intinya, kepercayaan (*trust*) maupun kekuatan (*power*) merupakan dua hal yang sama-sama dibutuhkan. Namun, kombinasi keduanya harus dipadukan dengan tepat.

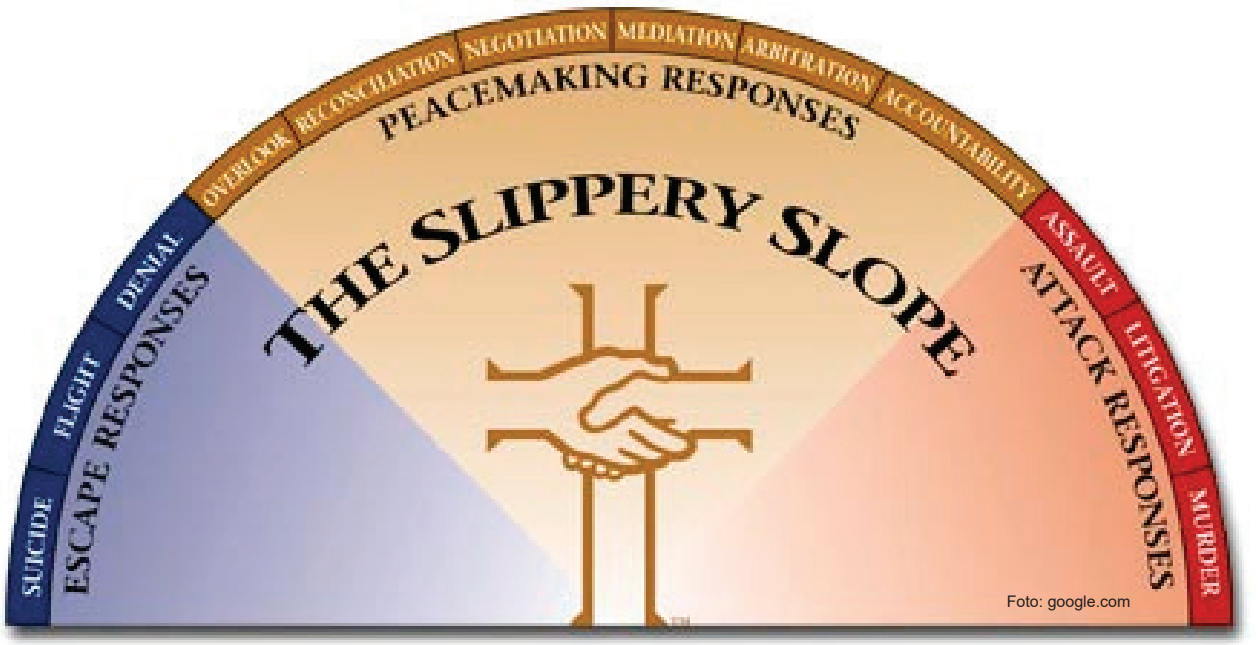

Maka muncullah teori yang disebut *slippery slope model* yang dikembangkan oleh Erich Kirchler. Pria kelahiran 4 November 1954 ini adalah seorang psikolog Italia-Austria dan profesor psikologi ekonomi di Universitas Wina. Penelitiannya meliputi bidang pekerjaan, psikologi organisasi, konsumen, dan ekonomi, khususnya psikologi pajak dan manajemen uang dalam rumah tangga. Dia terkenal karena penelitiannya tentang perilaku pajak dan moral pajak dengan model *slippery slope* yang telah diadopsi oleh sejumlah administrasi perpajakan.

Teori ini menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi-sosial dan *deterrence* memang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, keduanya memiliki perbedaan. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*), sedangkan variabel *deterrence* cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan/*enforced tax compliance*).

Menurut teori yang dikembangkan pada 2008 ini, kebijakan seperti pemeriksaan dan denda pajak cenderung akan meningkatkan persepsi terhadap kekuatan otoritas pajak (*power of authorities*) yang akan memengaruhi kepatuhan pajak yang dipaksakan. Berdasarkan teori *slippery slope* ini maka kebijakan peningkatan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Namun demikian, kebijakan pengawasan dan penegakan hukum seperti pemeriksaan dan pemberian sanksi yang adil, dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepatuhan pajak sukarela. Pemeriksaan dan pemberian sanksi yang dilakukan dengan prosedur yang adil akan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP. Selanjutnya, kepercayaan terhadap DJP akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Salah satu ciri masyarakat modern adalah mempunyai tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi pada regulasi pajak. Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat atas otoritas pajak (*trust in authorities*). Di sisi lain, kebijakan untuk mengurangi kepatuhan pajak yang dipaksakan, tergantung pada tingkat kepercayaan DJP atas wajib pajak. Untuk itu diperlukan transparansi dan kesetaraan derajat antara kedua belah pihak.

Berangkat dari hal tersebut, paradigma kepatuhan kooperatif hadir. Kepatuhan kooperatif merupakan salah satu kerangka baru kepatuhan wajib pajak yang berbasis *enhanced relationship* atau sering disebut *cooperative compliance*. Paradigma baru ini mensyaratkan adanya hubungan yang dibangun atas dasar transparansi, keterbukaan, saling percaya, dan saling memahami antara wajib pajak, otoritas pajak, dan konsultan pajak. Dengan demikian, isu pajak yang berpotensi menjadi sengketa dapat diidentifikasi dan didiskusikan sebelum menjadi pokok sengketa. Dengan kata lain, sengketa pajak dapat diselesaikan sejak dini.

Hubungan yang dibangun atas dasar transparansi dan kesetaraan derajat ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (hubungan mutualisme). Dengan adanya keterbukaan dari wajib pajak, DJP akan mampu memahami dengan lebih baik aktivitas bisnis wajib pajak yang di dalamnya mencakup informasi komersial, perubahan iklim bisnis yang memengaruhi kondisi wajib pajak, perspektif wajib pajak atas suatu aturan, dan sebagainya. Dengan begitu, keuntungan yang bisa diperoleh wajib pajak adalah bisa mengurangi ketidakpastian di sektor pajak dan memungkinkan adanya perbedaan perlakuan berdasarkan karakteristik kepatuhan wajib pajak.

Foto: google.com

Manfaat lain yang bisa diperoleh dengan menjalankan program kepatuhan kooperatif adalah berkurangnya biaya kepatuhan karena keterlibatan dalam kepatuhan kooperatif telah menyertakan suatu standar kepatuhan di awal. Berkurangnya biaya kepatuhan ini bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Bagi DJP, dengan adanya kepatuhan di awal akan mampu menghemat energi sumber daya pegawainya di bidang pemeriksaan. Demikian pula bagi wajib pajak, dengan tidak dilakukannya pemeriksaan berarti waktu dan energinya bisa dialokasikan ke hal lain.

Di samping itu, pendekatan dengan cara kepatuhan kooperatif mengharuskan DJP lebih banyak membuka ruang dialog dengan dewan direksi perusahaan. Sehingga, dengan mengetahui tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya dan memiliki akses langsung kepada pengambil keputusan dalam perusahaan, DJP bisa menawarkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Penulis : Ahmad Dahlan
Editor : Tobagus Manshor Makmun

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP UU HPP

01 ASAS

- Keadilan
- Kemanfaatan
- Kepastian Hukum
- Kepentingan Hukum
- Kesederhanaan
- Efisiensi

02 TUJUAN

- Meningkatkan dan memulihkan perekonomian
- Sistem pajak yang adil dan berkepastian hukum
- Reformasi administrasi, kebijakan pajak konsolidatif dan perluasan basis pajak
- Mengoptimalkan penerimaan negara
- Meningkatkan Kepatuhan WP

Edukasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Hari itu, kesibukan yang berbeda terlihat di salah satu ruangan seksi pelayanan KPP Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas). Para fungsional penyuluh pajak sedang bersiap untuk melakukan edukasi perpajakan. Beberapa orang memeriksa kesiapan sarana dan prasarana berupa komputer dan laptop yang akan digunakan, juga memastikan pranala zoom sudah aktif. Selain itu, ada juga yang berkoordinasi dengan seksi lain yang berdekatan agar menjaga ketenangan saat acara mulai dilaksanakan.

Menimbang satu dan lain hal, sosialisasi kali ini masih dilakukan secara daring. Namun, walaupun tidak ada tatap muka secara langsung, kegiatan yang disiapkan tetap terasa spesial. Hal itu karena tema yang akan diangkat adalah tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sebuah undang-undang yang baru disahkan pada 29 Oktober 2021.

Kamis, 11 November 2021 tepat pukul 09.00, kegiatan edukasi perpajakan secara virtual pun dimulai. Acara ini dihadiri oleh kepala

"Perlu kolaborasi kita semua untuk membangun kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan pajak punya korelasi kuat dengan *good (corporate) governance*," ujar Tunjung.

kantor, seluruh fungsional penyuluh, perwakilan *account representative*, wajib pajak, serta para undangan lain yang diminta hadir untuk memberikan pandangan terkait UU HPP.

Sebanyak 26 wajib pajak hadir dari 75 wajib pajak yang telah menerima undangan *batch* pertama. Dalam setiap sesi, jumlah wajib pajak yang diundang tidak terlalu banyak agar kegiatan berjalan efektif dan materi dapat lebih dipahami wajib pajak. Jumlah peserta yang sedikit juga diharapkan membuat kualitas komunikasi menjadi lebih baik lagi.

Dalam sambutannya saat pembukaan acara, Kepala KPP Migas, Muh. Tunjung Nugroho menyampaikan bahwa salah satu dari lima pilar reformasi perpajakan adalah adanya peraturan yang dibuat untuk menjamin adanya kepastian hukum yang menampung dinamika perekonomian dengan mengurangi biaya kepatuhan, memperluas bisnis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan semua itu, pada akhirnya tujuan untuk menciptakan *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dapat terwujud.

Voluntary Compliance adalah kepatuhan kooperatif yang ditandai dengan tumbuhnya kepercayaan wajib pajak serta otoritas pajak yang lebih mengedepankan upaya untuk melakukan dialog, interaksi, dan kolaborasi dalam menjaring kepatuhan pajak. “Perlu kolaborasi kita semua untuk membangun kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan pajak punya korelasi kuat dengan *good (corporate) governance,*” ujar Tunjung.

Kepatuhan pajak seringkali menjadi penyebab utama terciptanya *shortfall* penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Problem kepatuhan pajak yang masih kurang optimal seakan menjadi batu sandungan dalam pengumpulan pundi-pundi keuangan negara. Karena itu, wajib pajak diminta untuk lebih meningkatkan kepatuhan perpajakan baik dari sisi pembayaran maupun pelaporan pajaknya

Selanjutnya, enam kluster materi utama yang terdapat dalam UU HPP disampaikan oleh para penyuluh pajak. Harmonisasi atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disampaikan oleh Evie Andayani. Kemudian, penyelarasan atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-Undang Pajak Penghasilan disampaikan oleh Ibnu Prastowo. Setelah itu, Anik Meilani menyampaikan program pengungkapan sukarela, pajak karbon, dan cukai.

Agus Wahyudi, Ketua Tim 2 Penyuluh Pajak KPP Migas yang menjadi moderator berhasil membuat kegiatan berjalan dengan interaktif. Selain itu, para pemateri juga mampu menyajikan secara apik. Diskusi pun berlangsung menarik. Peserta antusias untuk bertanya, baik berupa pertanyaan langsung maupun melalui *chat room*.

Acara ini diselingi *ice breaking* yang dipandu Ifta Ilfia Utami. Permainan tebak lagu yang dikemas cantik berhasil mencairkan suasana dan menjadi ajang saling mengenal antar peserta kegiatan. Tak ketinggalan, di penghujung acara, panitia menyiapkan suvenir bagi wajib pajak yang aktif dalam berinteraksi dengan mengisi *pre test*, *post test* dan survei.

Sosialisasi UU HPP yang dilakukan KPP Migas ini merupakan bagian dari edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan *voluntary compliance*. Hal ini penting, karena kepatuhan pajak adalah salah satu kunci menuju *good corporate governance*. Sebuah langkah kecil untuk bangsa. Pada akhirnya, ujung perjalanan ini adalah tegaknya kedaulatan negara.

Penulis : Didi Mulyadi
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Foto: google.com

Annus Mirabilis, Sebuah Tahun yang Indah untuk KPP Migas

Akhir triwulan III 2021, ada aura dan suasana kebatinan berbeda di KPP Migas dibandingkan dengan 2020 atau awal 2021. Nuansa ini semakin terasa di akhir Oktober 2021. *Trajectory* penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) menunjukan arah positif untuk menembus capaian 100% dari target penerimaan sebesar 64,73 triliun rupiah, bahkan lebih. Suatu hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya karena bayang-bayang pandemi yang berkobar sejak 2020 dan semakin memuncak di dua triwulan pertama 2021. Target 100% juga terasa jauh karena sejak tahun 2017–dengan capaian 102%–KPP Migas tidak pernah mencapai target penerimaan. Mungkinkan 2021 adalah *annus mirabilis* atau tahun yang indah bagi KPP Migas? Bisakah KPP Migas menggapai penerimaan di tahun yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian ini?

Filsuf Yunani, Heraclitus (544 SM-583 SM) pernah berkata bahwa tidak ada suatu yang permanen kecuali perubahan. Kehidupan kadang melemparkan kita ke situasi terburuk, tetapi tiba-tiba dapat mengangkat kita ke kondisi yang indah dalam sekejap mata, begitu pula sebaliknya. Yang perlu kita lakukan adalah bertahan dan percaya bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan dalam kemudahan kita selalu mawas diri dan tidak jumawa.

Tidak dapat disangkal, pandemi Covid-19 adalah salah satu ujian terburuk yang pernah dialami Indonesia. Banyak ketidakpastian yang dihadapi dan perubahan yang harus diadaptasi oleh segenap elemen bangsa. Untuk mengatasi pandemi tersebut, pemerintah dipaksa untuk mengambil pil pahit yaitu melakukan pembatasan kegiatan dan aktivitas masyarakat. Hal ini berdampak pada kegiatan ekonomi yang merosot dan tingkat pengangguran menyentuh level tertinggi sejak 2005. Sebagai akibatnya, penerimaan dari perpajakan pun menurun dengan

tajam, padahal di saat bersamaan, kebutuhan pendanaan untuk mengatasi pandemi sangat besar. Baik atau buruk, benar atau salah respons yang diberikan pemerintah, hanya waktu yang bisa menjawab.

Masih segar di ingatan kita, pada akhir semester pertama 2021, banyak pengamat, baik dalam maupun luar negeri yang mencemooh dan menyatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia. Namun, dengan optimisme tinggi dan ekakarsa yang kuat untuk keluar dari keterpurukan, berdasarkan indeks pemulihan Covid-19 yang dirilis Nikkei pada 06 Oktober 2021, kita merupakan negara terbaik dalam menghadapi pandemi di antara negara-negara di Asia Tenggara.

Seiring dengan itu, perbaikan kondisi pandemi Covid-19 di level nasional juga dibarengi dengan perbaikan di level internasional, khususnya di Cina dan Amerika Serikat. Pembatasan kegiatan masyarakat yang ketat pun diperlonggar dan ekonomi mulai bergerak dengan cepat. Peningkatan pergerakan ekonomi domestik dan dunia yang cepat ini mendorong kenaikan permintaan berbagai komoditas, khususnya minyak dan gas bumi.

Pada April 2021, KPP Migas mencatat terdapat penerimaan 11,64 triliun rupiah. Angka ini menunjukan perbaikan yang signifikan dari penerimaan 2020 serta peningkatan sebesar 220,49% dari penerimaan Maret 2021. Tren pertumbuhan penerimaan bulanan di KPP Migas terus menanjak sampai akhir November 2021. Fenomena ini bak bumi dan langit apabila dibandingkan dengan tren pertumbuhan minus bulanan yang terjadi di 2020.

Oktober 2021, harga minyak dunia yang menjadi acuan harga minyak mentah Indonesia menyentuh level tertinggi sejak 2014 dan secara konsisten meneruskan peningkatan signifikan yang terjadi sejak awal triwulan III tahun 2020. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo dalam audiensi dengan jajaran Kepala KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus pada 15 November 2021 di rooftop KPP PMA I bahkan menyampaikan bahwa tidak lagi relevan membandingkan capaian pertumbuhan penerimaan 2021 dengan 2020, sehingga seharusnya KPP-KPP di lingkungan Kanwil Khusus memberikan gambaran yang lebih optimis atas capaian penerimaan di akhir 2021. KPP Migas yang merupakan KPP dengan target penerimaan terbesar di Kanwil Khusus dan terbesar kelima dari seluruh KPP yang ada di Indonesia seharusnya menargetkan penerimaan yang lebih tinggi dari hanya sekedar mencapai target “minimal” 100%. Dengan mindset tersebut, KPP Migas ditugaskan oleh Kanwil Khusus untuk menggapai target penerimaan sebesar 67,96 triliun rupiah atau 104,99% dari target.

Sampai dengan 30 November 2021, capaian penerimaan netto KPP Migas adalah 61,34 triliun rupiah. Untuk mencapai target 104%, perolehan penerimaan netto Desember 2021 harus bertambah 6,27 triliun rupiah atau lebih tinggi 477 miliar dari capaian penerimaan netto November 2021. Sebuah tantangan yang cukup berat yang hanya dapat dijawab dengan sikap optimisme dan semangat yang tingi, kerja ekstra keras, serta tentu saja intervensi Yang Maha Kuasa.

Bagi KPP Migas, mengemban penerimaan yang sangat besar bukan hanya sekadar menunaikan tugas. Kepala KPP Migas, Muh. Tunjung Nugroho selalu menekankan bahwa sebagai KPP dengan penerimaan terbesar kelima nasional dan terbesar di Kanwil Khusus, ada tanggung jawab lain yang lebih dari sekadar capaian individu KPP Migas. Keberhasilan menggapai target 104,99% tersebut berpengaruh sangat signifikan terhadap pencapaian target Kanwil Khusus dan juga mendorong pencapaian penerimaan nasional. Dengan peran penerimaan perpajakan sekitar 80% dari APBN, maka setiap persen tambahan penerimaan dari KPP Migas berperan cukup signifikan dalam ketahanan APBN dan kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara lebih mandiri.

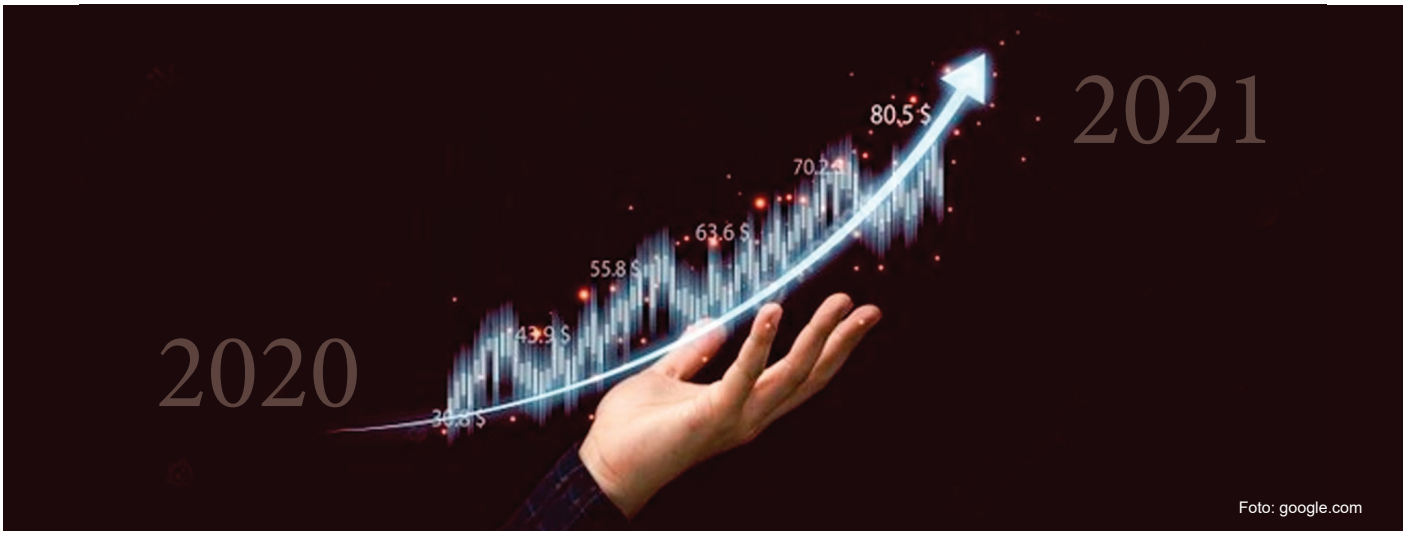

Foto: google.com

Mari kita menelaah apa yang terjadi dan telah dilakukan di 11 bulan pertama tahun 2021 yang berdampak terhadap penerimaan perpajakan KPP Migas. Ada beberapa faktor yang menurut penulis berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target penerimaan melebihi 100%. Faktor-faktor tersebut ada yang di luar kendali KPP Migas (faktor eksternal) dan faktor-faktor internal yang saling terkait membentuk jalinan takdir di 2021.

Sebagaimana diketahui, KPP Migas adalah satu-satunya KPP di Indonesia yang meng-administrasikan penerimaan pajak penghasilan minyak dan gas bumi (PPh migas) di Indonesia, selain pajak-pajak pusat lainnya yang menjadi kewajiban para wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama (WP K3S), wajib pajak jasa penunjang migas, serta wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pengusahaan wilayah kerja panas bumi (geothermal).

Komposisi target penerimaan PPh migas mencakup 70,71% dari rencana penerimaan 2021. Sedangkan dari total realisasi, peran PPh migas mencapai 73,8%. Dengan demikian, keberhasilan pengumpulan PPh migas menjadi sangat penting dalam upaya pencapaian target penerimaan. Setelah PPh migas, PBB Migas merupakan sumber penerimaan yang besar bagi KPP Migas yang mencakup 11,82% dari total penerimaan. Sedangkan penerimaan di luar migas, PPN, PPh badan dari WP jasa penunjang, serta dan PPh pemotongan/pemungutan, termasuk dari WP K3S, memegang peranan 14,38% dari total realisasi penerimaan netto 2021.

Sampai dengan 30 November 2021, PPh migas yang sudah masuk ke kas negara berjumlah 45,91 triliun rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2020, capaian realisasi penerimaan PPh migas meningkat sebesar 16,87 triliun rupiah. Faktor utama dari peningkatan ini adalah meningkatnya harga minyak mentah dunia. Tidak ada yang menyangka bahwa harga minyak yang pernah jatuh sampai ke level belasan dollar per barel di April 2020 bisa menyentuh lebih dari 80 dollar Amerika Serikat per barrel pada Oktober 2021. Namun, timbul pertanyaan di benak banyak pihak, mengapa harga minyak meningkat sampai dua kali lipat tapi penerimaan dari PPh migas "hanya" tumbuh 58%? Apakah mungkin ada *compliance gap* yang gagal diawasi oleh KPP Migas terkait pengawasan pembayaran PPh migas?

Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu diketahui bahwa PPh migas pada dasarnya terdiri dari dua unsur, yaitu PPh Badan dan PPh atas laba setelah pajak dengan dasar penghitungan pajaknya didasarkan pada konsep penghasilan bersih. Harga minyak mentah yang meningkat sudah pasti meningkatkan angka *lifting* atau penjualan, tetapi penghitungan PPh migasnya masih harus memperhitungkan biaya-biaya untuk menghasilkan *lifting* migas tersebut. Pada saat harga minyak meningkat, biasanya para vendor atau jasa penunjang juga menaikan harga barang

dan jasa yang ditawarkan. Dengan demikian, pengaruh harga minyak tidak berbanding lurus secara *head-to-head* dengan kenaikan nilai PPh migas.

Selain itu, komposisi penerimaan PPh migas dari minyak bumi hanya menyumbang sekitar 36% dari total penerimaan PPh migas, 64% sisanya berasal dari gas bumi. Nilai *lifting* gas bumi sebagian besar telah dipatok berdasarkan harga kontrak. Di samping itu, penentu kenaikan atau penurunan nilai PPh migas yang berlaku secara *accros the board* baik minyak atau gas bumi adalah nilai kurs rupiah terhadap dollar. Sayangnya, nilai kurs rupiah terhadap dollar rata rata di tahun 2021 masih di bawah rata rata tahun 2020.

Untuk faktor internal, KPP Migas telah melakukan penataan yang lebih baik terhadap pengawasan pembayaran PPh migas dengan membentuk tim khusus. Tim ini bertugas untuk menyandingkan antara pelaporan dan pembayaran PPh migas oleh WP K3S dengan data pembanding berupa *financial quarterly report* (FQR) Triwulan IV yang telah divalidasi oleh SKK Migas. Hal ini dapat terlaksana berkat kerjasama yang konstruktif dan efektif dengan SKK Migas, khususnya Divisi Akuntansi. Pengawasan yang dilakukan menghasilkan 486 miliar rupiah yang merupakan pembayaran atas tahun pajak 2019 ke bawah atau sekitar 1% dari total pembayaran PPh migas yang disetor di 2021.

Selain itu, terhadap WP K3S dengan kontrak *Cost Recovery* juga dilakukan pemeriksaan bersama antara SKK Migas, Ditjen Pajak, dan BPKP. Alhasil, untuk PPh migas, dapat dikatakan dengan keyakinan yang cukup memadai bahwa celah ketidakpatuhan pembayaran PPh migas sangat minimal, bila tidak bisa dikatakan tidak ada sama sekali.

Pada 2021, untuk mengurangi beban *cash flow*, WP K3S Migas termasuk yang diberikan insentif pengurangan sebesar 50% dalam penghitungan PPh migasnya sampai dengan masa Juni 2021. Oleh karena itu, sejak masa Juli 2021, pembayaran PPh migas mengalami kenaikan sekitar 24% dari masa-masa sebelumnya sebagai konsekuensi logis dihilangkannya insentif tersebut.

Untuk PBB migas dan PBB sektor lainnya, pada 2021 terjadi penurunan sebesar 18% dibandingkan 2020. Komposisi PBB migas terdiri dari PBB migas yang dibayar melalui mekanisme pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebesar 5,62 triliun rupiah dan PBB migas yang dibayar sendiri oleh WP K3S senilai 1,67 triliun rupiah. KPP Migas juga mengadministrasikan PBB sektor lainnya yang meliputi sektor perikanan tangkap, jaringan kabel telekomunikasi, ruas jalan tol, jaringan kabel listrik, dan sebagainya. Nilai PBB sektor lainnya ini menyumbang sebesar 57,57 miliar rupiah. Pada Desember 2021 diperkirakan akan ada tambahan penerimaan sebesar 487,1miliar rupiah yang berasal dari pemindahbukuan tambahan dari DJA, kegiatan pemeriksaan PBB migas, serta pembayaran PBB sektor lainnya yang jatuh tempo.

Sampai dengan November 2021, penerimaan neto PPN dalam negeri, PPN impor, dan PPN jasa luar negeri sebesar 2,86 triliun rupiah. Nilai tersebut menyumbang 4,7% dari total penerimaan netto KPP Migas sampai dengan 03 Desember 2021. Untuk periode yang sama, PPh Badan yang merupakan pembayaran dari WP jasa penunjang tercatat 2021 sebesar 553,16 miliar rupiah, sedangkan PPh pemotongan dan pemungutan telah berhasil terkumpul 4,62 triliun rupiah.

Menutup perjalanan di akhir tahun, hingga 22 Desember 2021, KPP Migas berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar 69,336 triliun rupiah. Nilai tersebut membuat KPP Migas melejit dan mencapai 107,11% dari target penerimaan. 2021 akhirnya benar-benar menjadi *annus mirabilis*. Sebuah tahun saat segala jerih payah dan keajaiban doa berujung indah. Tugas yang diemban KPP Migas tuntas sudah.

Penulis: Mashar Resmawan
Editor: Tobagus Manshor Makmun

Tren Penerimaan Neto KPP Migas

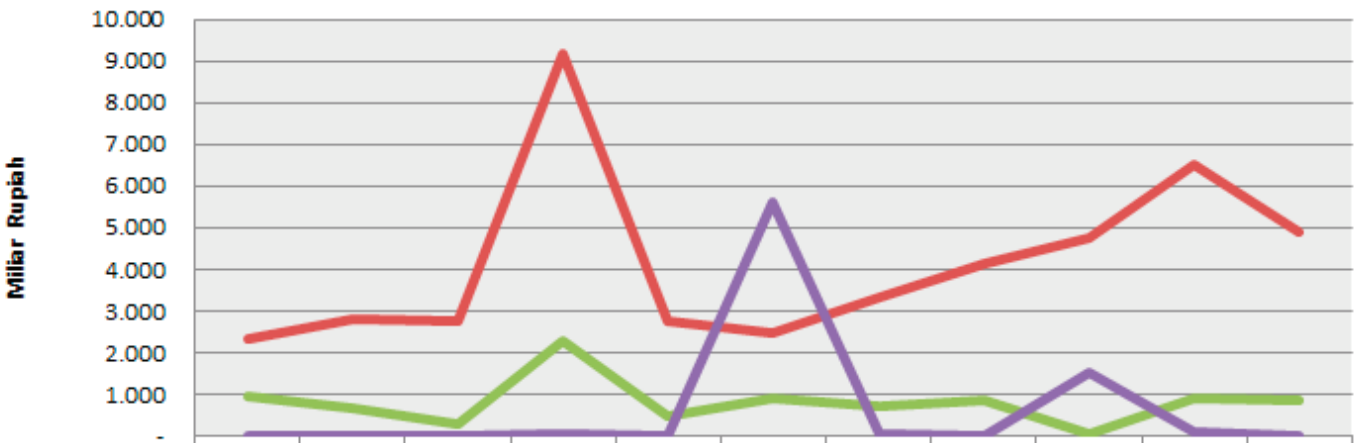

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PPh Migas	2.348	2.802	2.759	9.166	2.780	2.449	3.327	4.122	4.772	6.515	4.898
Non Migas	959	680	262	2.300	474	883	694	848	54	919	879
PBB	3	1	-	50	2	5.625	27	13	1.505	113	15

Penerimaan Neto PPh Migas

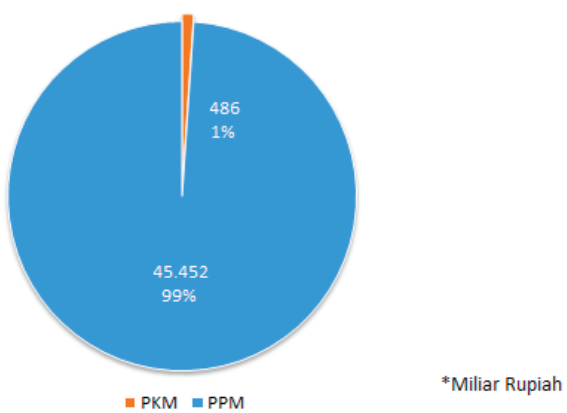

*Miliar Rupiah

Penerimaan Neto

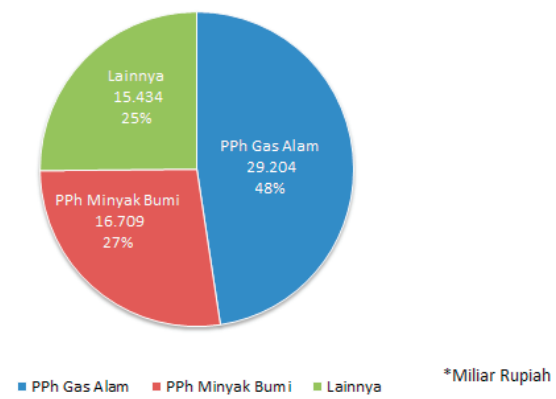

*Miliar Rupiah

Mengenal Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Konvensional dengan Skema *Cost Recovery* (Bagian I)

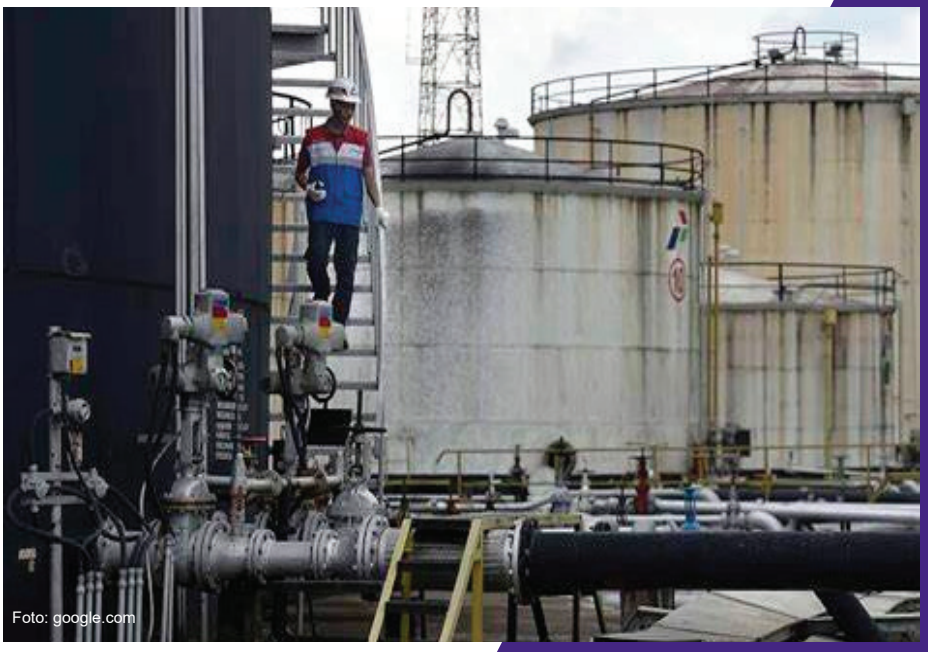
Foto: google.com

Setelah terjadi kesepakatan antara pemenang penawaran lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dengan pemerintah maka proses berikutnya adalah penandatanganan kontrak kerja sama bagi hasil. Pada edisi kali ini, kita akan mengenal lebih dekat kontrak kerja sama bagi hasil dengan skema *cost recovery* bagi usaha hulu minyak dan gas bumi (konvensional).

1. Sifat Kontrak

Merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 36/PUU-X/2012, kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi merupakan kontrak yang bersifat keperdataan dan tunduk pada hukum keperdataan. Kesepakatan atas hal-hal yang disetujui dalam sebuah kontrak kerja sama akan menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang berkontrak. Jika salah satu pihak menginginkan terjadinya penyimpangan dalam isi kontrak yang telah disepakati maka harus atas sepersetujuan pihak lain yang berkontrak.

Hal ini menjadikan terdapat berbagai variasi dalam isi kontrak kerja sama karena secara linear waktu, kebijakan setiap wilayah kerja pada tiap rezim dapat berbeda. Karena itu, hal terbaik yang dapat dilakukan untuk memastikan aspek-aspek yang terkandung dalam kontrak kerja sama bagi hasil di setiap wilayah kerja adalah dengan membaca masing-masing kontrak. Setiap kontrak kerja sama bisa memuat aspek-aspek yang berlainan. Prinsip tersebut yang harus dipegang ketika memasuki kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

2. Pihak Pertama

Mengenali kontrak wilayah kerja di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari rezim perundang-undangan saat tanggal penandatanganan kontrak. Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi telah dimulai bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada 1899, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan *Indische Mijn Wet* untuk mengatur regulasi pertambangan umum di wilayah Indonesia. Aturan ini kemudian diubah pada 1910. Sistem yang digunakan pemerintah kolonial Belanda adalah menggunakan konsesi, yakni hak atas kekayaan minyak dan gas bumi yang berada pada suatu wilayah kerja dimiliki oleh perusahaan (baik swasta murni maupun perusahaan dalam penguasaan pemerintah kolonial Belanda). Kegiatan operasional dikendalikan penuh oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki konsesi kemudian membayar pajak dan royalti kepada pemerintah.

Pada 1960, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai wujud kemandirian perundangan di bidang hulu migas yang merupakan turunan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah berlakunya perpu tersebut, dimulailah rezim kontrak karya di Indonesia. Pada rezim kontrak karya, negara menjadi pemilik dari minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja (blok).

Pengusahaan suatu wilayah dikelola oleh perusahaan milik negara (Pertamin, Permigan, dan Permina) yang berkontrak dengan kontraktor. Perusahaan Negara Pertamin dan Permina merupakan cikal bakal PT. Pertamina (Persero) yang kita kenal sekarang. Kegiatan operasional dikendalikan penuh oleh kontraktor. Kontraktor mendapatkan upah berupa jasa (*fee*) yang dibayarkan dalam bentuk uang. Perjanjian karya (kontrak karya) produk dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 baru berlaku efektif setelah disahkan dengan undang-undang. Pada praktiknya, kontrak karya menciptakan birokrasi yang panjang.

Pada 1971, Pemerintah Indonesia bersama dengan parlemen menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Penerbitan undang-undang tersebut didahului dengan peristiwa pembubaran Perusahaan Negara (PN) Permigan melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1966 serta peleburan PN Permina dan Pertamin menjadi Pertamina berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1968. Undang-undang ini menjadi transformasi kontrak karya menjadi kontrak bagi hasil (*production sharing contract)*.

Foto: google.com

Foto: google.com

Pertamina menjadi perusahaan migas milik negara yang menjalankan usaha di bidang hulu sampai hilir minyak dan gas bumi. Di samping itu, Pertamina juga menjadi kuasa pertambangan atas kekayaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Perusahaan ini bertanggung jawab atas manajemen operasional hulu minyak dan gas bumi.

Kontrak kerja sama bagi hasil dapat berlaku efektif tanpa perlu pengesahan dengan penerbitan undang-undang. Kontraktor mendapatkan penghasilan dalam beberapa bentuk, di antaranya: pengembalian biaya operasi (*cost recovery*) dari produksi wilayah kerja, bagi hasil antara negara dengan kontraktor (apabila hasil produksi melebihi biaya operasi baik yang telah dipulihkan maupun belum dipulihkan), *first tranche petroleum* (hanya ketika kontraktor disebut berhak dalam kontrak), *domestic market obligation fee* (hanya ketika kontraktor disebut berhak dalam kontrak), serta *investment credit* (hanya ketika kontraktor disebut berhak dalam kontrak). Selain itu, masih terdapat *lifting price variance* berupa faktor selisih harga yang terjadi karena perbedaan harga minyak mentah Indonesia bulanan dengan harga minyak mentah Indonesia rata-rata tertimbang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 bertahan selama tiga dekade sebelum terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dengan uji materi Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Undang-undang tersebut memindahkan fungsi kuasa pertambangan hulu minyak dan gas bumi dari Pertamina ke Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Kemudian, Pertamina menjadi entitas bisnis murni baik di bidang hulu maupun hilir (pemisahan di bidang hilir diiringi dengan pendirian Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi). Pada 2012, BP Migas diputus bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka menindaklanjuti putusan uji materi tersebut, pemerintah membentuk Satuan Khusus Kerja Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013.

Saat membaca kontrak kerja sama bagi hasil yang masih berlaku, kita akan menemukan keanekaragaman nama sebagai pihak pertama dalam kontrak. Nama-nama tersebut, di antaranya Pertamina/Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, BP Migas, dan SKK Migas sebagai pihak yang diamanati oleh peraturan perundangan. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi pembaca untuk membantu menafsirkan kontrak

berdasarkan historis perundangan yang berlaku saat ditandatanganinya kontrak tersebut.

3. Bahasa

Secara umum, bahasa yang digunakan dalam kontrak kerja sama bagi hasil yang masih berlaku di Indonesia adalah bahasa Inggris dan Indonesia. Terdapat kontrak yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saja, tetapi juga terdapat kontrak yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (asing) pada satu kontrak yang sama.

Kontrak-kontrak yang hanya memuat bahasa Indonesia saja maupun memuat dwibahasa yaitu bahasa Indonesia-bahasa Inggris (asing) merupakan pelaksanaan Pasal 31 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga model kontrak tersebut mudah ditemui pada kontrak-kontrak kerja sama yang ditandatangani setelah tahun 2009. Khusus untuk kontrak kerja sama bagi hasil yang memuat dua bahasa, akan diatur mengenai pilihan bahasa yang digunakan apabila terdapat perbedaan penafsiran.

4. Kontraktor

Kontraktor biasa disebut sebagai pihak kedua dalam kontrak kerja sama bagi hasil. Kontraktor adalah pihak yang menyatakan memiliki kemampuan keuangan, kecakapan teknis, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan operasi minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang dimenangkan. Kontraktor dalam kontrak kerja sama bagi hasil dapat terdiri dari satu atau beberapa badan usaha. Setiap badan usaha yang menjadi kontraktor di suatu kontrak kerja sama adalah *participating interest holder*.

Hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor yang tidak dibagi dalam dan berdasarkan kontrak kerja sama bagi hasil dikenal dengan *participating interest*. Perubahan komposisi kontraktor adalah sebuah keniscayaan dalam industri hulu migas. Pada saat penandatanganan kontrak kerja sama bagi hasil, mungkin pihak yang disebut sebagai kontraktor hanya terdiri dari satu badan usaha. Namun, seiring berjalannya waktu, sangat mungkin terjadi peralihan kepemilikan saham badan usaha, bahkan mungkin badan usaha tersebut ingin berbagi kepesertaan dengan badan usaha lain di wilayah kerja tersebut dengan mengalihkan sebagian *participating interest*.

Apabila seluruh hak, kepentingan, dan kewajiban setiap *participating interest holder* diatur rinci di dalam kontrak maka akan menghambat proses perubahan komposisi kontraktor karena menuntut amandemen pada setiap perubahan komposisi kontraktor. Hambatan tersebut akan menambah panjang pelaksanaan waktu operasi hulu migas. Amandemen juga dapat diikuti dengan kekhawatiran risiko perubahan rezim perundangan yang berbeda antara pada saat penandatanganan pertama dengan amandemen kontrak.

Secara umum, hak, kepentingan, dan kewajiban yang dibagi dalam kontrak kerja sama bagi hasil adalah antara pihak pertama dengan kontraktor secara keseluruhan. Masing-masing *participating interest holder* dalam kontrak selanjutnya akan membuat perjanjian tersendiri seperti *joint operating agreement*. Di dalam perjanjian tersebut, mereka umumnya akan membagi hak dan kewajiban masing-masing *participating* dalam bertindak sebagai kontraktor kontrak bagi hasil suatu wilayah kerja. Pembagian hak dan kewajiban di antaranya pengaturan mengenai tata cara pembagian hasil minyak dan gas bumi untuk jatah kontraktor, tata cara *cash call*, tanggung jawab perpajakan, penunjukan operator, dan pengaturan lainnya.

tulisan ini dibatasi oleh pengetahuan dan pengalaman dari penulis, apabila terdapat kesalahan ataupun ketidakbenaran agar memberitahukan melalui redaksi untuk dapat diperbaiki pada edisi berikutnya.

Penulis: Fatah Manohara
Editor: Tobagus Manshor Makmun

Mengetuk Pintu Langit dengan Bakti Sosial

Pagi ini, seperti pagi-pagi yang lain, aku mengawali hari dengan secangkir kopi. Matahari perlahan meninggi, tetapi sinarnya tidak begitu terik. Suara burung gereja di atap kantor menenangkan hati. Di sini, sebuah kantor di seberang Kalibata City, kupikir kau tak bisa berharap suasana yang lebih baik lagi. Namun, memang ada sesuatu yang berbeda, sesekali aku menengok lapangan parkir dari balik jendela ruang kerja. Sembari mengerjakan tugas, aku sedang menunggu seseorang.

Pagi ini, seperti pagi-pagi yang lain, aku mengawali hari dengan secangkir kopi. Matahari perlahan meninggi, tetapi sinarnya tidak begitu terik. Suara burung gereja di atap kantor menenangkan hati. Di sini, sebuah kantor di seberang Kalibata City, kupikir kau tak bisa berharap suasana yang lebih baik lagi. Namun, memang ada sesuatu yang berbeda, sesekali aku menengok lapangan parkir dari balik jendela ruang kerja. Sembari mengerjakan tugas, aku

sedang menunggu seseorang.

Hari ini hari Jumat. Saatnya aku dan teman-teman Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) melakukan rutinitas bakti sosial. Rasanya tak sabar untuk segera menyapa para penerima. Kami sudah berkemas lebih awal. Walaupun telah menjadi kegiatan rutin, tetapi semangat kami masih seperti di awal mula, dari menyiapkan personel, kendaraan, hingga menentukan lokasi yang menjadi sasaran pelaksanaan. Sesuatu yang tidak pernah menjenuhkan bagi kami. Kaos merah menyala dan sepatu *sneakers* rasanya cukup menunjukan seberapa besar antusiasme kami.

Tidak berapa lama, yang kami tunggu datang. Sebuah mobil hitam memasuki lapangan parkir. Lalu, seorang pria berusia sekitar 50 tahun turun dan membuka pintu belakang mobil. Satu per satu kantong plastik besar berisi paket nasi kotak ia pindahkan ke mobil yang telah kami siapkan. Kali ini, sasaran kegiatan kami adalah sekitaran Kalibata Plaza, TMP Kalibata, serta gerobak nasi gratis di Perumahan Kalibata.

Bakti sosial yang kami lakukan telah menjadi kegiatan rutin sejak beberapa tahun yang lalu. Tepatnya sejak Kepala KPP Migas dijabat Imanul Hakim. Tradisi ini dilanjutkan sampai sekarang ketika Muh. Tunjung Nugroho menjadi pimpinan kami. Kami beruntung dipimpin orang-orang yang memiliki kepekaan sosial. Tidak jarang kepala kantor memelopori kegiatan sosial di luar bakti sosial rutin, misalnya santunan ke beberapa panti asuhan di sekitar Kalibata.

Dalam pelaksanaannya, bakti sosial dikerjakan oleh tim kecil yang terdiri dari lima sampai enam pegawai. Tim dipimpin oleh koordinator bakti sosial dari Paguyuban Pegawai KPP Migas. Setiap minggu, tim akan berganti, disesuaikan dengan kondisi pegawai. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya kuantitas pekerjaan personel dan waktu pelaksanaan kegiatan. Setiap pegawai KPP Migas mempunyai kesempatan yang sama untuk turut serta dalam kegiatan.

Pendanaan kegiatan bakti sosial berasal dari iuran para pegawai KPP Migas yang dipotong melalui bendahara gaji setiap bulan. Sebelumnya, para pegawai mengisi formulir persetujuan pemotongan gaji. Iuran ini bersifat sukarela

sehingga jumlah potongan pun berbeda-beda. Dana yang telah dipotong tersebut diserahkan kepada tim pada awal bulan. Kemudian, dana yang diterima tersebut dibagi untuk kegiatan bakti sosial Kesatuan Kantor Pajak Kalibata dan kegiatan bakti sosial rutin rutin KPP Migas. Dana yang dialokasikan untuk KPP Migas digunakan untuk membeli paket-paket makan siang.

Setiap minggu, jumlah paket yang dibagikan berkisar antara 100 sampai dengan 150 paket. Paket ini dibagikan ke beberapa tempat, di antaranya sekitaran komplek kantor pajak Kalibata, TPS Pengadegan, jalan raya sekitar Plaza Kalibata, jalan raya sekitar Stasiun Duren Kalibata, sekitar TMP Kalibata, jalan Rawajati, gerobak nasi gratis Perumahan Kalibata, dan tempat-tempat lainnya. Paket-paket tersebut kami bagikan langsung kepada para pemulung, pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, petugas kebersihan, dan para pengguna jalan lainnya.

Setiap minggu kami harus menentukan menu yang akan kami bagikan. Sepintas, hal ini terlihat remeh. Namun, penentuan menu adalah salah satu kunci keberhasilan kegiatan. Kami ingin setiap paket yang tersaji tak hanya sekadar ada, tetapi juga menggugah selera. Menu yang kami sediakan berbeda setiap minggu, mulai dari nasi bakar, nasi telor balado, nasi ayam goreng, nasi kebuli, nasi ayam bakar, ataupun menu lainnya. Variasi menu tersebut membuat paket-paket kami menjadi hal yang selalu ditunggu.

Dalam menentukan menu, kami bertanya kepada beberapa penerima. Hal itu bertujuan untuk memastikan paket yang kami berikan bisa dinikmati. Menu-menu tersebut dipesan dari beberapa rekanan yang sudah biasa bekerjasama dengan kami. Selain harga yang lebih murah, para rekanan juga sudah tahu jenis-jenis menu yang kami butuhkan. Pada hari dan waktu yang telah ditentukan, paket yang telah kami pesan akan diantar ke kantor untuk selanjutnya distribusikan ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan.

Di KPP Migas, bakti sosial bukanlah sekadar kegiatan yang mengikuti tren. Lebih dari itu, kami memiliki keyakinan tentang kekuatan lain dari kegiatan ini. Kami percaya bahwa bakti sosial–yang dalam konteks spiritual disebut juga dengan

sedekah–memberi kontribusi yang besar terhadap tercapainya target yang diemban. Kami sadar bahwa walaupun semua tugas telah dikerjakan secara maksimal, tetapi hasil akhirnya juga dipengaruhi banyak hal yang berada di luar kuasa kami. Tuhan adalah penentu ujung dari setiap perjalanan. Kami berharap sedekah yang kami lakukan membuat Tuhan menggenapkan segala upaya yang telah kami usahakan. Dengan doa orang-orang penerima bantuan, kami berharap bisa mengetuk pintu langit untuk terwujudnya segala harapan.

Penulis : Endar Prasetyo
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Ufuk timur kota Bekasi, Stasiun Kranji

Di ujung cakrawala, ribuan kilometer jauhnya, seolah pedang Sang Maha Pencipta terayun membelah langit dan memerintahkan surya mengintip. Sebuah penanda bahwa hari telah dimulai. Saatnya beranjak lagi.

Foto : Ifta Ilfia Utami
Takarir : Fifit Wahyuda Setiawan

Menyambut mentari, sang nelayan menjala ikan dengan semangat menjemput rezeki. Mari kita menyambut tahun 2022 dengan semangat, menjala penerimaan untuk negeri.

Foto: Putri Kumala Dewi (www.instagram.com/byputri)
Takarir: Markus Apriandhie

Konsumsi plastik yang berlebihan menjadi jalan terjal bagi upaya perubahan yang dilakukan pemerintah dan pemerhati lingkungan. Yuk, lebih bijak dalam menggunakan plastik dan tingkatkan kesadaran dalam manajemen sampah, untuk lingkungan yang lebih baik.

foto: Rika Hidayati
takarir: Rika Hidayati

Seekor kucing melintas di sebelah sumur gas lapangan unitisasi Jambaran-Tiung Biru. Sumur yang diselesaikan dengan pekerjaan *rigless operation* dan menggunakan teknologi *long interval perforation* itu tak sedikit pun menarik perhatiannya. "Hari ini terlalu panas, aku butuh berteduh," mungkin hanya itu yang ada di pikirannya.

Foto: Widodo Hadijatmiko
Takarir: Tobagus Manshor Makmun

Kaleidoskop 2021
KPP Migas

Januari 2021

Mengawali tahun 2021 dengan masih dibayang-bayangi pandemi, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) mengadakan internalisasi *corporate value* (ICV) pembinaan mental dengan tema "Tingkatkan Integritas dan Kinerja Dengan Semangat Baru". Kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi kepada pegawai KPP Migas untuk mengawali tahun yang baru dengan optimis, sehingga dapat terus meningkatkan kinerja dan integritasnya demi mencapai target. Bukan hanya dengan kesehatan jasmani, tetapi juga kesehatan mental yang prima: sehat, semangat, produktif, dan bahagia.

Februari 2021

Pada rapat pembinaan II c, Kepala KPP Migas, Muh. Tunjung Nugroho memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai untuk selalu melakukan perbaikan dan inovasi pada setiap fungsinya. Selain itu, KPP Migas juga menerima beberapa penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus yang secara simbolis diberikan kepada seksi-seksi terkait dalam acara tersebut, antara lain:

- kinerja pencairan piutang pajak terbaik Tahun 2020;
- tercapainya target kepatuhan surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2020;
- pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terbaik 100%;
- kinerja pertumbuhan *effort* pemeriksaan terbaik tahun 2020;
- kinerja keberatan dan banding terbaik tahun 2020;
- kinerja juru sita pajak terbaik 1 tahun 2020.

Maret 2021

Penandatanganan pakta integritas dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPP Migas sebagai bukti komitmen penyelenggaraan tugas yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penandatanganan tersebut dilakukan secara rutin setiap tahun dan merupakan salah satu pilar dalam usaha menciptakan zona integritas wilayah bebas korupsi (ZIWBK). KPP Migas juga menerbitkan buku *Rencana Aksi 2021*. Buku dengan tema "Upaya Pencapaian Kepatuhan Formal dan Material secara Terstruktur, Sistematis, dan Terukur" tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh fungsi yang ada di KPP Migas dalam mengejar target 2021.

April 2021

Tax gathering digelar secara daring dan dihadiri tidak kurang dari 200 wajib pajak KPP Migas. Acara ini bertujuan menjalin komunikasi dan sinergi yang lebih baik antara KPP Migas dengan para pemangku kepentingan. Acara yang digelar selama dua hari ini dihadiri Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas, Arief S. Handoko, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Budi Susanto, dan dimeriahkan dengan sesi motivasi dari Helmy Yahya serta hiburan *stand up comedy* oleh Trio Komika ASN. Sebagai bentuk apresiasi, KPP Migas memberikan penghargaan kepada 20 wajib pajak atas kontribusi pembayaran terbesar dan kepatuhan pelaporan selama tahun 2020.

Mei 2021

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan saat mulai operasi (SMO) reorganisasi pada 24 Mei 2021. Reorganisasi ini menggabungkan seksi penagihan dan seksi pemeriksaan, menambah seksi pengawasan, serta membentuk jabatan baru, yaitu fungsional penyuluh pajak. KPP Migas mempunyai 9 penyuluh pajak yang terdiri dari 1 orang penyuluh ahli madya, 4 orang penyuluh ahli muda dan 4 orang penyuluh ahli pertama. Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Budi Susanto mengunjungi KPP Migas dalam rangka memberikan dukungan kepada para penyuluh pajak. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapan, dengan pembentukan jabatan fungsional penyuluh maka kegiatan edukasi perpajakan bisa menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran kepada wajib pajak tentang pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Juni 2021

KPP Migas meluncurkan emigazine edisi perdana. Acara ini dihadiri Kepala KPP Migas, Muh. Tunjung Nugroho, jajaran eselon IV, supervisor, pemimpin redaksi, dan tim emigazine. Peluncuran ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala Kantor dan penyerahkan foto sampul emigazine secara simbolis dari pemimpin redaksi kepada Kepala Kantor.

Juli 2021

Kasus pandemi covid-19 kembali berada di puncaknya dengan tingkat kematian tertinggi selama wabah terjadi di Indonesia. Sebagai upaya mencegah penularan, KPP Migas secara rutin melakukan tes antigen kepada seluruh pegawai, satpam, dan pramubhakti.

Agustus 2021

KPP Migas menyemarakkan peringatan ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia dengan megadakan kegiatan bertajuk "Semangat Merdeka untuk Kesempurnaan". Pada peringatan tahun ini, diselenggarakan berbagai perlombaan, baik antar regu maupun antar seksi. Perlombaan antar regu melibatkan pegawai-pegawai lintas seksi dengan cabang yang dilombakan antara lain: bulu tangkis, tenis meja, catur, menyanyikan lagu perjuangan, dan panahan, sedangkan pertandingan antar seksi meliputi foto dengan tema kemerdekaan dan lomba kebersihan.

September 2021

Penyuluh KPP Migas menyelenggarakan edukasi perpajakan *one on one*, yaitu kegiatan mengundang satu wajib pajak untuk menyampaikan rapor kewajiban perpajakan yang telah dilakukan. Sasaran dari kegiatan ini wajib pajak dengan pelaporan SPT Tahunan PPh yang belum dipenuhi dan memiliki tunggakan pajak yang sudah melewati jatuh tempo. Dengan kegiatan ini, kepatuhan SPT diharapkan bisa meningkat dan terdapat kontribusi penerimaan dari pembayaran tunggakan pajak.

Oktober 2021

"Semua akan pindah pada waktunya", sebuah kalimat yang diyakini oleh setiap pegawai pajak. Mutasi adalah sebuah keniscayaan. Rekan kerja, sahabat seperjuangan suatu saat akan dipisahkan oleh mutasi atau promosi. Pada sebuah Jumat di bulan Oktober , diadakan acara perpisahan bagi 48 pegawai KPP Migas—salah satu mutasi terbesar selama tiga tahun terakhir. Di balik derai tawa, ada sekelebat duka dalam getaran kata dan tangis yang tertahan.

November 2021

Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021. Sehubungan dengan itu, penyuluh KPP Migas menyelenggarakan edukasi perpajakan UU HPP sebanyak dua kali dengan total jumlah wajib pajak yang hadir sebanyak 171. Kegiatan ini akan diselenggarakan secara berkesinambungan dengan bahasan per kluster setelah terbitnya aturan pelaksanaan undang-undang tersebut.

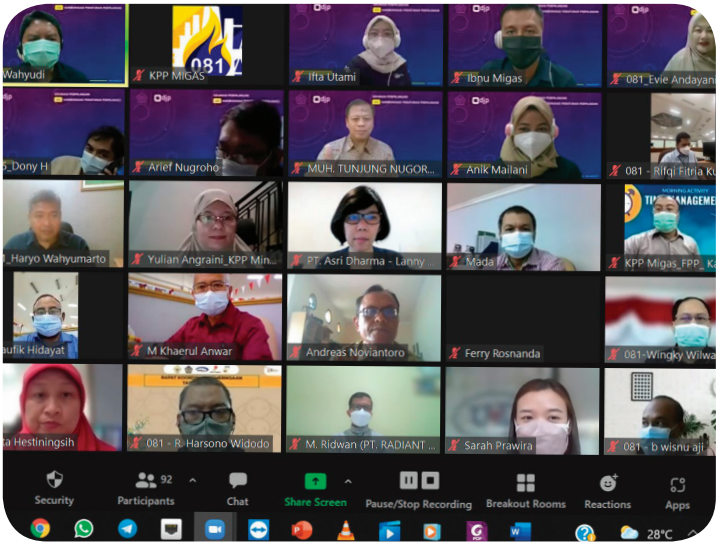

Desember 2021

Di penghujung 2021, KPP Migas meyelenggarakan internalisasi *corporate value* dengan tema "Sehat Bersinergi Bahagia Berprestasi". Bertempat di 5G Resort Cijeruk, acara yang dilakukan untuk menguatkan kembali *team building* ini sekaligus menjadi ajang tasyakuran atas tercapainya target penerimaan 2021. Pada tahun ini, berdasarkan data per 27 Desember 2021, KPP Migas berhasil mencapai 107,06% dari target yang diberikan.

Penulis : Agus Wahyudi & Ifta Ilfia Utami
Editor : Tobagus Manshor Makmun

djp

Program Pengungkapan Sukarela
PPS
Voluntary Disclosure Program
Gotong Royong | Adil | Setara

SALURAN INFORMASI

Khusus PPS

1500-008

TELEPON

081156-15008

WHATSAPP

SENIN-JUMAT

08 00 WIB – 16 00 WIB

mulai

3 Januari 2022

Saluran informasi lain yang tetap dapat dimanfaatkan:

LIVECHAT
www.pajak.go.id

TWITTER
@Kring_Pajak

EMAIL
informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id

www.pajak.go.id

djp

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU HPP telah diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Ada beberapa pokok perubahan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

Desain oleh: Aditya Pradana Putra

Pokok-pokok Perubahan

KUP

- Penggunaan NIK sebagai NPWP Pribadi
- Besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum
- Pajak Internasional
- Kuasa Wajib Pajak
- Penegakan Hukum Pidana Pajak dengan mengedepankan Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara

PPH

- Perubahan tarif dan bracket PPh OP
- Tarif PPh Badan 22%
- Batas Peredaran Bruto Rp500 juta tidak dikenai PPh
- Pajak atas Natura

PPN

- Pengecualian Objek PPN
- Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN
- Tarif Umum dan Tarif Khusus PPN

PAJAK KARBON

- Implementasi pertama kali 01 April 2022 pada sektor batubara
- Tarif Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO_2e)

CUKAI

- Penguatan mekanisme penetapan Barang Kena Cukai (BKC)
- Ultimatum Remedium
- Penambahan / pengurangan BKC
- Besaran sanksi

Program Pengungkapan Sukarela

- Kebijakan 1
  Peserta TA yang dapat mengungkapkan harta yang belum diungkap dalam TA dengan membayar PPh Final
- Kebijakan 2
  Wajib pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta yang berasal dari penghasilan dari tahun 2016 s.d. 2020. Namun, belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 dengan membayar PPh Final

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

www.pajak.go.id

MENENGOK JAMBARAN-TIUNG BIRU, PROYEK STRATEGIS YANG SEGERA DITUNTASKAN

Bojonegoro, wilayah Jawa Timur paling barat yang terletak di pinggir Bengawan Solo dan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, lekat dengan kisah Arya Penangsang. Konon, Adipati Jipang Panolan tersebut kehilangan kesaktiannya setelah menyeberangi Bengawan Solo saat hendak menyerang pasukan Pajang. Peristiwa yang kemudian berujung pada kematiannya. Kejadian tersebut membentuk sebuah mitos bahwa pemimpin yang berani menginjakkan kaki di Bojonegoro akan kehilangan tahta.

Tentu bukan rasa penasaran tentang mitos tersebut yang membuat kami menempuh perjalanan darat sejauh kurang lebih 663 kilometer dari Jakarta. Bojonegoro bukan hanya punya kisah Arya Penangsang. Di sana juga terdapat Blok Cepu, salah satu sumber deposit minyak terbesar di Indonesia, berdampingan dengan wilayah kerja migas milik PT Pertamina EP. Terletak melintasi dua wilayah kerja tersebut, sebuah lapangan gas yang memiliki nama eksotis: Jambaran-Tiung Biru. Inilah catatan penulis saat bersama tim Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) mengunjungi lokasi tersebut.

Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) terletak di Desa Bandungrejo, Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur. Kepemilikan sahamnya 100% berada pada Pertamina, dengan rincian 92% PT Pertamina EP Cepu (PEPC) dan 8% PT Pertamina EP. Pada 2013, PEPC yang terdaftar di KPP Migas ditunjuk oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menjadi operator pelaksanaan unitisasi lapangan tersebut.

Lapangan Unitisasi JTB merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan diharapkan akan menjadi salah satu penghasil gas terbesar di Indonesia. Peletakan batu pertama proyek

dengan nilai investasi mencapai 1,5 miliar USD ini dilakukan Ignasius Johan (Menteri ESDM) pada 25 September 2017. Produksi gas JTB diproyeksikan mencapai 192 *million standard cubic feet per day* (MMSCFD) dengan alokasi 100 MMSCFD diperuntukkan bagi PLN untuk kebutuhan listrik di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Perjalanan menuju lokasi kami tempuh menggunakan transportasi darat dengan waktu tempuh kurang lebih 13 jam. Protokol kesehatan yang ketat dari tim *Health, Safety, Security, and Environment* (HSSE) PEPC tidak memperbolehkan kami menaiki transportasi publik. Selain itu, prosedur keselamatan juga membatasi kecepatan kendaraan, serta seberapa lama pengemudi boleh menyetir sebelum diharuskan beristirahat. Namun, tak apa, kami menikmatinya. Kadang lelah juga menjalani hidup yang serba terburu-buru. Berangkat dari Jakarta pukul delapan pagi, kendaraan yang membawa kami baru tiba di hotel Aston Bojonegoro pukul setengah sepuluh malam.

Keesokan harinya, dengan mengenakan pakaian alat pelindung diri (APD) lengkap, kami menuju lokasi proyek JTB. Tempat pengolahan gas ini berjarak sekitar 60 kilometer dari tempat kami menginap. Memasuki lokasi yang begitu luas dan penjagaan ketat 24 jam nonstop, penulis mulai merasakan akan mendapatkan sensasi pengalaman yang istimewa.

Sebelum berkeliling, kami diberi pengarahan terkait keamanan dan keselamatan ketika berada di lokasi. Bersama Wahyudi, *Assistant Manager Project Planning & Execution*, kami mengunjungi empat lokasi, yaitu *gas processing utilities* (GPF), Jambaran Tiung Biru *Central,* Jambaran Tiung Biru *East,* dan *metering.* Pada lokasi GPF terdapat tiga fasilitas yang dibangun, yaitu fasilitas pengolah hidrogen sulfida, pengolah karbon dioksida, dan fasilitas pendukung berupa pembangkit listrik dan pengolahan air. Jumlah sumur gas (*wellpad*) saat ini ada enam, dengan

rincian dua sumur di JTB *Central*, sedangkan empat lainnya berada di JTB *East*. Penyaluran gas yang diproduksi kepada konsumen akan dilakukan melalui fasilitas milik Pertagas. Titik serahnya berada pada lokasi *metering*.

Tim KPP Migas juga mendapatkan gambaran umum proses bisnis yang disampaikan oleh Iwan Hamzah, *Senior Manager Project GPF & PL*, terkait proses bisnis yang dilakukan di JTB sebagai berikut:

1. kapasitas desain GPF adalah 330 MMSCFD dengan masa produksi 25 tahun;
2. tujuan proyek adalah memproduksi gas dan kondensat dari Lapangan Unitisasi JTB dengan produksi rata-rata raw gas sebesar 315 MMSCFD (*Million Standard Cubic Feet per Day*) atau *equal* dengan 1.180 m3/h, dan untuk target *gas onstream* komersial dilakukan pada kuartil empat 2021 dengan penjualan gas sebesar 192 MMSCFD;
3. gambaran *engineering, procurement and construction* (EPC) proyek GPF JTB meliputi:
   - fasilitas produksi maupun pendukung pada 6 *wellpad* yaitu di JTB Central dan JTB East
   - pemasangan jalur pipa produksi dari sumur JTB Central dan JTB ke GPF
   - pembuatan GPF dengan kapasitas 330 MMSCD berikut fasilitas (*utilities*) pendukungnya, dan
   - pemasangan *sales gas pipeline* dari GPF ke pipa pertagas (*open sales source pipeline*) dan fasilitas pendukungnya.

   Penjualan gas masuk ke fasilitas *Pertagas Transmision Pipeline* Gresik–Semarang Gresem dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik serta industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur;
4. pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB bertujuan menghasilkan gas dan kondensat dengan rata-rata produksi *raw* gas sebesar 315 MMSFCD (gas yang diproduksi mengandung 0,6% H2S dan 34% CO2). Dari jumlah itu, dihasilkan *sales* gas (gas yang siap dijual) sebesar 192 MMSCFD dan kondensat 2700 *barrel condensat per day* (BCPD);
5. *scope of works* JTB meliputi :
   - tanah akuisi yang sudah selesai pengurusannya berupa tanah pribadi ±30 Ha, Perhutani ±144,5 Ha, tanah kompensasi ±290 Ha;
   - *early civil work* (ECW) : sumur (w*ellpad),* akses jalan, jalur pipa produksi, dan jalur pipa penjualan (selesai);
   - pemboran enam sumur pengembangan dan satu sumur P&A (*plug and abandonmet*) di Lapangan Jambaran-Tiung Biru (selesai);
   - pembangunan GPF serta fasilitas pendukung (*on progress*);
6. target penyelesaian sesuai rencana adalah pada kuartil empat 2021, tetapi diperkirakan baru akan selesai pada Mei 2022. Dalam hal ini, PEPC memberikan catatan keterlambatan terutama disebabkan tertundanya fabrikasi beberapa peralatan di luar negeri akibat pandemi covid-19 di negara-negara produsen, seperti India, Italia, Inggris, dan Kanada.

Secara keseluruhan, berdasarkan data per November 2021, proyek yang dikerjakan telah selesai 95%. PEPC pun menorehkan prestasi dengan membukukan total 27 juta jam kerja tanpa kecelakaan. Rata-rata jumlah yang dipekerjakan sebanyak 6.400 orang dengan 60% hingga 70% merupakan pekerja lokal Bojonegoro.

Sebuah pengalaman baru yang mengesankan. Berjalan kaki dengan dikawal petugas berseragam, lengkap dengan senjata laras panjang, mengelilingi lokasi proyek yang masih dipenuhi pekerja dan segala peralatannya. *Ngomong-ngomong*, Bojonegoro panas sekali. Sempat terpikir, apakah dulu Arya Penangsang kalah perang karena kepanasan?

Penulis : Ibnu Prastowo
Editor : Tobagus Manshor Makmun
Foto : Widodo Hadijatmiko

Yon Arsal,

Adaptif dan Dinamis Menerjang Zaman

Anak itu begitu asyik dengan bacaannya. Duduk tenang, tenggelam dalam imajinasi di sebuah kios persewaan buku. Satu komik telah selesai, berlanjut ke komik berikutnya, begitu seterusnya. Jam demi jam berlalu tanpa ia sadari. Di sebuah kios lainnya, seorang bapak sedang gelisah. Hari itu, ia mengajak anak laki-lakinya ikut berjualan, tetapi sudah hampir seharian si anak tidak terlihat. Ia lalu berkeliling pasar, bertanya kepada semua orang, apakah mereka melihat anak laki-laki berumur sekitar lima atau enam tahun yang berkeliaran?

Bapak itu tak pernah membayangkan bahwa beberapa puluh tahun kemudian, si anak yang sempat membuatnya kebingungan akan menjadi salah seorang pejabat eselon satu termuda di Kementerian Keuangan. Anak

kccil itu adalah Yon Arsal, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan. “Orang tua saya bingung *nyari*, dipikirnya saya hilang. Tapi dari situ mereka tahu bahwa saya senang membaca,” kenang pria kelahiran Bukittinggi, 1 Desember 1972 ini.

Yon, anak pertama dari delapan bersaudara, berasal dari keluarga sederhana. “Orang tua saya berdagang. Kalau ibu, *sih*, bertani di rumah. Bertani itu pun *ngerjain* sawah punya orang, bukan sawah kita,” ujarnya.

Ia mengawali pendidikan dengan masuk sekolah dasar (SD) inpres yang ada di dekat rumahnya. Generasi sekarang mungkin tak familiar dengan nama sekolah ini. SD inpres, yang juga sering disebut sebagai “sekolah kecil”, digagas oleh ekonom Widjodjo Nitisastro. Presiden Suharto kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar. Sekolah-sekolah ini didirikan untuk menuntaskan masalah buta huruf, terutama pada penduduk yang berada di daerah pelosok atau pedesaan.

Selepas SD, ia melanjutkan pendidikan pada madrasah tsanawiyah (MTs) yang bahkan lebih dekat lagi, ada di sebelah rumah. Ia mengaku tak memiliki cita-cita yang muluk. Namun, melihat orang tua yang pontang-panting bekerja untuk menyekolahkan anak, juga adik-adiknya yang banyak, membuatnya termotivasi untuk tekun belajar. “Alhamdulillah, saya sejak SD selalu juara umum terus,” tuturnya. Prestasi tersebut mulai menumbuhkan keyakinan bahwa ia mungkin bisa memperbaiki nasib.

Saat hendak melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bukittinggi, ia sempat merasa khawatir dan tidak percaya diri. “Ini orang kampung, dari tsanawiyah, lo. Masuk ke SMA yang saat itu merupakan sekolah favorit dan ketemu dengan banyak teman-teman yang jadi jagoan di sana,” ungkapnya. Namun, ternyata kekhawatirannya tidak terbukti. “Semester satu, ternyata saya juara umum juga,” tuturnya.

Setelah lulus SMA pada 1991, Yon mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan kuliah ke Bandung kepada orang tua. Ia tak gentar meskipun tidak memiliki sanak saudara di sana. “Saya *pede* aja karena kata teman-teman, ‘tenang, nanti di sana kita ada asrama,’” ungkapnya. Di Bandung, terdapat asrama kecamatan Banuhampu—sebuah kecamatan di Agam, Sumatera Barat—dengan kapasitas 10 hingga 20 orang yang bisa digunakan anak-anak baru, sembari mereka menyesuaikan diri.

Seperti kebanyakan teman sekolahnya dari Bukittinggi saat itu, ia bermaksud kuliah di Institut Teknologi Bandung

(ITB). Saat ujian masuk perguruan tinggi, dua pilihan pertamanya adalah jurusan pada kampus yang identik dengan teknik itu. Namun, Yon tidak diterima di dua jurusan tersebut. "Saya diterima di pilihan ketiga, akuntansi Unpad," ujarnya. Hasil itu sempat membuatnya tidak puas dan ingin kembali mengulang ujian untuk masuk ITB.

"Jadi, misalnya saya akan melakukan sesuatu, saya akan maju satu langkah dulu, sambil memperhatikan respons orang-orang. Karena menurut saya, organisasi akan tumbuh apabila kita maju bareng-bareng," tuturnya.

Setelah satu tahun menjalani kuliah di jurusan akuntansi Universitas Padjajaran (Unpad), pikiran Yon berubah. Ia merasa jurusan akuntansi cukup menyenangkan, apalagi nilai-nilai yang diperoleh pun memuaskan. "Di sini kita belajar sesuatu, yaitu mencoba menyenangi di mana kita berada," ucapnya. Selama kuliah, ia aktif berorganisasi, seperti senat dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), selain juga sempat menjadi asisten dosen. Namun, ia memiliki prinsip bahwa berorganisasi tidak boleh mengganggu kuliah. "Karena saya *mikirnya* orang tua itu susah, jadi kuliah saya harus lancar," cetusnya.

Lulus kuliah pada 1995, Yon sempat bekerja selama dua tahun di KPMG, sebuah jaringan jasa profesional multinasional dan merupakan satu dari empat organisasi akuntansi terbesar di dunia. Perkenalannya dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) awalnya karena alasan yang bersifat personal. "Keluarga saya di Bukittinggi jarang yang pegawai negeri, tetapi dari keluarga calon istri semuanya pegawai negeri, termasuk kakak ipar saya ada di pajak. Saya juga diminta untuk mendaftar jadi pegawai negeri," ungkapnya.

Saat memulai karir di DJP sebagai pelaksana seksi PPh Badan KPP Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1997, Yon mengaku tak memiliki bayangan suatu saat kelak akan menjadi apa. "Pokoknya, prinsipnya bekerja *aja* sebaik mungkin," katanya. Pengalaman sebagai auditor di KPMG membuatnya cepat menyesuaikan diri dengan pekerjaan di KPP. "Jadi, pemeriksaan itu bukan sesuatu yang baru-baru amat. Cuma bedanya, di sana pakai SAK (Standard Akuntansi Keuangan), di sini pakai undang-undang pajak," imbuhnya.

Setelah menjadi seorang pegawai negeri, ia masih menggunakan prinsip yang ia pelajari saat kuliah: seorang pegawai harus bisa menyukai di mana mereka berada. "Memang terdengar klise, tetapi pegawai negeri memang tidak bisa memilih untuk ditempatkan di mana," ujarnya. Dengan menyukai di mana pun ditempatkan, orang tidak akan banyak mengeluh. "Kalau kita banyak mengeluh, jadinya gak produktif," tandasnya.

Prinsip itu ia praktikkan saat pertama kali diterima di DJP. Sebelum penempatan definitif, ia sempat magang di beberapa KPP. Tugas yang ia terima di setiap KPP adalah menyortir surat setoran pajak (SSP). "Saya sebelumnya kan sudah kerja di KPMG dengan status yang bukan lagi junior auditor. Kalau *nurutin* ego, ya, pasti *gimana* lah," tuturnya. Namun, dengan prinsip yang ia pegang tersebut, semua pekerjaan selalu ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Hingga akhirnya saat magang di KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB), atasannya terkesan. "Dari situ saya ditanya, pernah kerja di mana? Waktu saya bilang pernah di KPMG, akhirnya saya disuruh bantu *meriksa*," ujarnya.

Menurutnya, seorang pegawai harus mampu bersikap adaptif, yakni pandai menyesuaikan diri dengan orang lain, tetapi dengan tetap tidak kehilangan jati diri. Bekerja juga akan lebih bermakna saat tidak dilakukan sebatas tugas dan fungsi (tusi) saja. Bagi Yon, bekerja juga adalah tentang menjaga kepercayaan. "Kita harus membuktikan bahwa kita layak berada di situ. Selain itu, kita juga harus membuktikan bahwa kita mampu atau *capable*," ucapnya.

Yon memang orang yang selalu berusaha melakukan yang terbaik, bahkan sebisa mungkin melakukan lebih dari yang diperintahkan. Akan tetapi, ia selalu berusaha menjaga keharmonisan di lingkungan pekerjaan dengan tidak melampaui wewenang dan selalu memperhatikan respons dari sekelilingnya. "Jadi, misalnya saya akan melakukan sesuatu, saya akan maju satu langkah dulu, sambil memperhatikan respons orang-orang. Karena menurut saya, organisasi akan tumbuh apabila kita maju bareng-bareng," tuturnya.

Hal tersebut ia praktikkan saat pembentukan *center for tax analysis* (CTA) dan *compliance risk management* (CRM). Konsep CRM meliputi pengawasan, pemeriksaan, penagihan, keberatan banding–hal yang berada di luar wewenangnya. "Saya hanya kasubdit dampak (Kasubdit Dampak Kebijakan). Bisa aja maju (sendiri) terus, tapi pasti *nggak* akan ada yang *support*. Caranya gimana? Kita ajak *ngobrol* kasubdit-kasubdit yang ada, kita lihat bagaimana responsnya," ujar Yon. Dengan maju selangkah demi selangkah dan mengajak semua pihak yang berkepentingan berpartisipasi, proyek ini bisa diselesaikan. Bahkan, proyek yang semula hanya berupa gugus tugas, sekarang bisa menjadi subdirektorat sendiri, sesuatu yang sebelumnya tak pernah terjadi di DJP.

Bagi Yon Arsal, apabila ingin maju, DJP harus selaras dengan *benchmarking* yang ada. Selain itu, DJP juga harus mampu adaptif dan dinamis dalam menghadapi perubahan zaman. Untuk bisa melakukan hal tersebut, sumber daya manusianya harus mendukung perubahan itu secara bersama-sama. "Karena itu, saya cocok, *tuh*, dengan gambar orang mengangkat rumah yang dari Pak Suryo. Semua harus kompak. Karena kalau ada yang jalannya berlawanan, bahaya juga," cetusnya.

Hubungan yang cair dan komunikasi yang efektif menjadi salah satu kunci untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Setiap kebijakan dari kantor pusat harus bisa dipahami dengan baik. Tak hanya itu, unit-unit di lapangan juga harus diberi kesempatan dan saluran yang memadai untuk memberikan umpan balik. Dengan semua individu terlibat dalam kemajuan organisasi maka cita-cita DJP akan bisa tercapai.

Penulis : Tobagus Manshor Makmun
Editor : Tobagus Manshor Makmun
Foto : Fajar Fadilah/Markus Apriandhie

Gowes, Cara Asyik untuk Berolahraga

Francesco Barnes Foto: google.com

*O*randum est ut sit mens sana in corpore sano, marilah kita berdoa semoga di dalam tubuh yang sehat terdapat pula jiwa yang sehat. Kalimat tersebut sering kita dengar versi singkatnya: *mens sana in corpore sano*. Suatu ungkapan yang salah kaprah, sebenarnya. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Sebuah pernyataan yang mudah sekali dibantah. Banyak orang yang tubuhnya kuat, tetapi jiwanya tidak sehat.

Namun, jiwa yang sehat memang memerlukan tubuh yang kuat–sebuah kondisi yang tidak datang begitu saja. Ia memerlukan sebuah kegiatan yang bagi sebagian orang berat untuk dilakukan: berolahraga. Apalagi di era teknologi canggih seperti saat ini, kita bisa melanglang buana hanya dengan duduk-duduk di sofa. Akhirnya, muncul istilah "kaum rebahan". Ada juga yang menyebut mager, akronim dari malas bergerak, yaitu mereka yang aktivitas fisiknya sangat sedikit.

Pandemi Covid-19 yang akhirnya mengubah kebiasaan kita. Berbagai sumber menyatakan bahwa virus corona mengakibatkan efek fatal bagi orang-orang yang imun tubuhnya lemah. Untuk meningkatkan imun, selain mengonsumsi berbagai vitamin dan suplemen, kita juga harus giat berolahraga dan berjemur sinar matahari pagi. Alhasil, orang berbondong-bondong untuk berolahraga ke luar rumah.

Bersepeda atau gowes menjadi salah satu alternatif olahraga, bahkan terfavorit karena praktis dan mudah dilakukan. Aktivitasnya yang dilakukan di luar ruangan memungkinkan kita untuk bermandikan sinar matahari. Dibandingkan dengan lari atau jalan kaki, pegowes juga dapat menjelajah lebih jauh. Gowes pun cenderung lebih santai jika dibandingkan dengan olahraga lainnya. Apalagi jika dilakukan beramai-ramai, misalnya dengan keluarga atau komunitas, semakin mengasyikan.

Gowes memberi manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Gowes yang dilakukan secara teratur dapat melatih otot inti, memperkuat otot-otot kaki, mengurangi nyeri sendi bagian bawah, membuat badan menjadi lebih bugar, meningkatkan kesehatan mental, mencegah sakit (seperti serangan jantung, stroke, dan darah tinggi), meningkatkan keseimbangan, memperbaiki postur dan koordinasi, serta banyak lagi manfaat lainnya.

Tertarik untuk ikut gowes? Sebelum memulai, sebaiknya kenali dulu jenis-jenis sepeda berdasarkan kegunaannya. Untuk pemula, minimal ada tiga jenis sepeda yang harus kita ketahui agar tidak "salah sepeda", yaitu sepeda lipat (seli), sepeda gunung atau *mountain bike* (*MTB*), dan sepeda balap atau *road bike* (*RB*). Walaupun sama-sama sepeda, tetapi ketiga sepeda tersebut berbeda kegunaannya:

1. Sepeda Lipat (Seli)

Sepeda lipat merupakan salah satu jenis sepeda yang digemari masyarakat perkotaan. Selain karena ukurannya yang ringkas dan bisa dilipat, sepeda lipat juga biasanya memiliki bobot yang ringan untuk dibawa ke mana-mana. Komunitas *bike to work* memanfaatkan keberadaan seli ini karena mereka bisa melipat dan menyimpannya di dalam ruangan kerja atau tempat khusus sepeda di dalam kantor.

2. Sepeda Gunung atau *Mountain Bike* (MTB)

Sepeda gunung biasa dikenal juga dengan nama *mountain bike* (MTB). Sesuai dengan namanya, sepeda ini pada awalnya dirancang untuk menaklukkan medan pegunungan. Dalam perkembangannya, sepeda MTB tak hanya digunakan untuk naik gunung saja, tetapi juga untuk medan *off-road* yang sulit dilalui sepeda biasa. Sepeda gunung biasanya dibangun dengan material kokoh namun tetap fleksibel agar bertahan di jalur yang tidak rata.

3. Sepeda Balap atau *Road Bike* (RB)

Sepeda balap atau RB dirancang sedemikian rupa untuk mampu meraih kecepatan tinggi di jalanan beraspal. RB biasanya memiliki bingkai dan roda yang ringan namun kokoh, serta dilengkapi fitur pengaturan kecepatan. Sepeda jenis ini sering dipergunakan untuk kejuaraan-kejuaran balap sepeda, seperti Tour de France, Tour de Langkawi–Malaysia, dan lain-lain.

Selain ketiga jenis sepeda tersebut, dikenal juga jenis sepeda BMX, sepeda *hybrid*, sepeda *onthel*. sepeda *fixie*, sepeda tandem, dan inovasi yang terakhir adalah sepeda listrik. Jenis yang terakhir bisa dijalankan secara manual maupun dengan baterai, untuk membantu pegowes yang nafsu gowesnya besar tapi tenaganya kurang. Dengan mengetahui jenis-jenisnya, paling tidak, kita tidak akan keliru memilih, misalnya menggunakan sepeda lipat untuk jalanan *off road*.

Selain bermanfaat bagi kesehatan, gowes juga bisa menjadi sarana rekreasi. Beberapa tempat wisata bahkan menyediakan persewaan sepeda bagi para pengunjung ataupun memberi kemudahan-kemudahan bagi komunitas pegowes. Salah satu contohnya bisa kita temukan di Taman Mini Indonesia Indah. Di tempat ini, pada hari Sabtu dan Minggu pagi akan dipenuhi oleh komunitas pegowes dari berbagai tempat.

Konon, jika dilakukan secara teratur, gowes juga dapat menurunkan berat badan, terutama pegowes yang menggunakan sepeda RB. Namun, penurunan berat badan tidak akan dapat dicapai oleh komunitas "gocapan" alias gowes sambil cari sarapan. Boro-boro berat badan turun, bisa-bisa malah bertambah.

Di tengah kesibukan mendulang penerimaan negara, kami, beberapa pegawai KPP Minyak dan Gas Bumi yang tergabung dalam komunitas 081CYC.com menyempatkan diri untuk gobar atau gowes bareng setiap Jumat pagi. Dengan mengusung slogan "yang penting foto-fotonya, bukan kilometernya", sebelum menentukan rute, kami akan mencari tahu spot foto terbaik di rute tersebut.

Jenis sepeda, sudah. Manfaat, sudah. Apalagi, ya? Langsung *action* saja *yuk*. Belum punya sepeda? Rasanya, saat ini harga sepeda sudah relatif terjangkau. Ingat, ya, tidak penting jenis sepedanya, yang penting *sepedaannya*.

Tarik *Siiss... Semongkoo!!!*

Penulis : Mira Roosmaya Dewi
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Camping Ceria, **Pilihan Wisata Aman di Era *New Normal***

Setelah pandemi covid-19 yang melanda dunia mulai mereda, muncul sebuah tren baru, yakni *revenge tourism*. Sesuai namanya, wisata balas dendam, orang-orang melampiaskan keinginan yang lama terpendam selama pembatasan kegiatan. Tempat wisata yang mulai dibuka pun dipenuhi pengunjung. Akan tetapi, pertanyaannya adalah: apakah itu aman?

Salah satu kegiatan yang dapat dicoba dan relatif aman adalah *camping* atau berkemah. *Camping* yang saya maksud adalah *camping* ceria–orang-orang menyebutnya *campcer*. Berkemah merupakan kegiatan yang mengasyikkan, tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama, seperti mendirikan tenda, menyalakan api unggun, juga memasak mie instan bisa memperkuat ikatan batin dalam keluarga. Selain itu, karena dilakukan di alam terbuka, kita dapat memilih tempat dan menyesuaikan waktu yang tidak terlalu ramai sehingga *social distancing* tetap berjalan.

Jauh sebelum pandemi melanda, saya dan keluarga sudah sering berkemah. Banyak tempat yang telah kami kunjungi. Berikut adalah tempat-tempat yang pernah saya datangi dan bisa menjadi alternatif untuk *revenge tourism* yang aman, ramah, murah, dan meriah :

1. Kampung Cai Ranca Upas

Siapa yang tidak kenal Kampung Cai Ranca Upas? Tempat yang lebih sering disebut Ranca Upas ini sejak dulu menjadi favorit para *traveller*. Terletak di ketinggian 1700 mdpl, daerah ini bersuhu sejuk. Suhu di malam atau dini hari bisa mencapai 15-17 derajat Celsius, sedangkan dalam kondisi normal sekitar 20 derajat Celsius.

Ranca Upas adalah tempat pertama kali saya berkemah. Waktu itu, sebelum akhirnya memutuskan berangkat, saya sempat ragu-ragu karena anak saya yang pertama baru berumur lima tahun dan yang kedua kurang dari dua tahun. Dengan persiapan ala kadarnya, tenda dan peralatan masak

seadanya, kami nekat ke sana. Namun, begitu sampai di sana, kami langsung jatuh cinta. Ya, Ranca Upas adalah cinta pertama kami dalam dunia berkemah. Namanya cinta pertama, ia selalu membuat kami ingin kembali. Sampai sekarang, kami sudah tiga kali berkemah di sana. Kata anak zaman sekarang, *vibe*-nya *ngangenin* banget.

Tempat ini dapat ditempuh kurang lebih 3-4 jam dari Jakarta. Setelah keluar pintu tol Soroja, ikuti saja ke arah Ciwidey. Anda juga bisa mengikuti arahan dari google maps, tinggal ketik "Kampung Cai Ranca Upas" maka akan langsung diarahkan ke sana.

Lokasinya persis di seberang pintu masuk Kawasan Wisata Kawah Putih. Ongkos yang harus dibayar–terakhir kali saya ke sana–adalah parkir mobil Rp10.000 dan biaya berkemah Rp25.000 per orang.

Tidak perlu takut kelaparan karena ada warung-warung yang menjual makanan, dari gorengan, mie instan, hingga makanan berat yang buka 24 jam. Selain itu, mereka juga menjual kayu bakar untuk api unggun Rp15.000 per ikat. Satu ikat isinya cukup banyak dan bisa untuk membuat api unggun semalam. Untuk yang belum punya tenda, di sana juga ada persewaan tenda, tinggal pilih jenis yang kita inginkan. Toilet pun tersedia banyak.

Selain berkemah, kegiatan lain di Ranca Upas adalah memberi makan rusa di penangkaran. Ada juga pemandian air hangat, tempat favorit anak-anak.

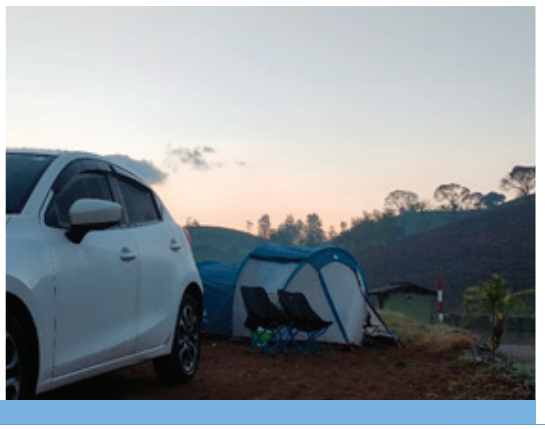

2. Situ Datar Camp Station, Pengalengan

Selain terkenal sebagai daerah perkebunan teh dan penghasil susu, Pengalengan juga memiliki banyak tempat wisata yang indah. Salah satu tempat berkemah di sana adalah Situ Datar Camp Station. Tempat ini dapat ditempuh kira-kira 4-5 jam dari Jakarta, sedikit lebih jauh daripada Ranca Upas. Dari arah Jakarta, keluar tol Soroja, lalu ikuti petunjuk di aplikasi maps. Setelah melewati Situ Cileunca yang legendaris, terus saja ikuti jalan hingga bertemu plang Situ Datar Camp Station.

Tempat ini sangat indah dengan danau yang dikelilingi kebun teh. Sepanjang mata memandang, kita akan disuguhi pemandangan hijau yang menenangkan. Untuk berkemah di sana dikenakan biaya Rp25.000 per orang. Pihak pengelola juga menyediakan sewa tenda dan matras. Jangan lupa membawa baju tebal karena udara di malam hari sangat dingin.

Tempat ini hampir selalu penuh saat akhir pekan, sehingga saya menyarankan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu. Terdapat fasilitas berupa toilet yang cukup bersih, mushola, dan warung. Namun, saat saya ke sana, warung belum beroperasi. Selain berkemah, kegiatan lain yang bisa dilakukan adalah *canoeing* dan *tracking* di kebun teh, seru dan menyehatkan.

3. Jungle Milk, Cikole, Lembang

Jungle Milk terletak di kawasan Jayagiri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tempat ini adalah *private camp ground*, sehingga jumlah pengunjung benar-benar dibatasi. Pada saat saya ke sana, hanya ada empat tenda yang berdiri. Menurut pengelola, tempat ini baru dibuka akhir 2020.

Untuk menuju Jungle Milk dari arah Jakarta, ada dua pilihan jalan. Pilihan pertama, Anda bisa melewati jalan tol Cikampek dan Cipularang, lalu masuk ke Bandung melalui gerbang tol Pasteur, kemudian ke arah Lembang dan Tangkuban Perahu. Setelah sampai Pintu Gerbang Orchid Forest Cikole, belok kiri masuk gerbang Perhutani. Durasi tempuh jalur ini sekitar 3 jam 40 menit.

Anda juga bisa melalui jalan tol Cikampek, lalu masuk ke tol Cikopo-Palimanan dan keluar dari gerbang tol Subang dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam. Setelah keluar tol, susuri saja jalan ke arah Tangkuban Perahu. Kemudian, setelah melewati Kebun Teh Ciater–Subang, ada pertigaan Jalan Raya Tangkuban Perahu, ambil arah kiri. Jika sudah menemukan pintu masuk ke Orchid Forest Cikole, silakan masuk menuju gerbang Perhutani.

Dari gerbang tersebut, terus saja susuri jalan naik sekitar 15 menit. Setelah itu, kita akan menemukan gerbang Jungle Milk berwarna biru. Dari situ, jalanan menuju ke area berkemah masih berupa jalan tanah, tetapi aman untuk semua jenis kendaraan, termasuk sedan.

Selain berkemah, ada beberapa akitivitas yang bisa dilakukan, yaitu piknik, menunggang kuda, *tracking*, dan mengendarai ATV menelusuri hutan. Biaya yang harus dibayar bervariasi, tergantung apakah kita membawa tenda sendiri atau sewa di sana. Kebetulan, waktu itu saya membawa tenda sendiri, sehingga hanya membayar Rp100.000 per orang, di luar

tiket masuk kawasan Perhutani Rp10.000 per orang. Namun, ada kemungkinan harganya sudah naik karena tempat ini cukup populer. Satu hal yang juga menarik di sana adalah saat pagi kita bisa melihat kuda-kuda yang dilepaskan sedang merumput. Tempat ini juga menyediakan toilet dan kafe yang buka 24 jam.

4. Pantai Anyer

Berkemah di pantai? Mengapa tidak? Setelah beberapa kali di tempat dingin, saya tertarik mengajak anak-anak berkemah di pantai. Di sepanjang Anyer ada beberapa pantai yang cocok untuk mendirikan tenda. Dengan jarak tempuh kurang lebih 2-3 jam dari Jakarta, berkemah di Pantai Anyer layak dicoba.

Kali pertama, saya berkemah di Pantai Karang Kitri. Tempatnya luas, berumput, dan dekat dengan pantai yang masih ada sedikit pasirnya, sehingga anak-anak bisa bermain dengan ombak yang tidak terlalu besar. Tersedia toilet dan warung juga. Biaya masuk yang dikenakan sebesar Rp50.000 per kendaraan. Saat itu, hanya saya sendiri yang berkemah. Ibu penjaga warung mengatakan jarang ada orang berkemah di tempat itu.

Lokasi Pantai Karang Kitri Pantai terletak sebelum hotel Aston Anyer. Sayangnya, ketika kami datang lagi, tempat ini sudah berubah. Nampaknya sedang dilakukan renovasi yang membuat rumput di sekitar pantai rusak.

Akhirnya, kami mencari tempat lain dan menemukan Pantai Cibeureum. Pantai ini letaknya sebelum Pantai Karang Kitri kalau dari arah Jakarta/ Cilegon. Berkemah di pantai ini aman dan tersedia toilet. Tampat ini selalu ramai saat akhir pekan, sehingga saya menyarankan untuk mengambil hari kerja apabila menginginkan suasana lebih tenang. Sampai saat ini, kami sudah tiga kali berkemah di sekitar Pantai Anyer. Hal yang perlu dipersiapkan saat berkemah di pantai adalah kipas angin *portable* karena udaranya yang cenderung panas.

Beberapa tempat yang saya sebutkan di atas adalah tempat berkemah aman dan ramah anak. Apabila anda menginginkan informasi tambahan tentang tempat-tempat tersebut, bisa juga melihat review di Youtube. Sejenak, letakkan gawai anda, *yuk* menikmati alam.

Penulis : Mudrik Nazari
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Restoran ini juga menyediakan "Petai" makanan yang punya penggemar dan pembenci sama banyaknya.

Warung Nasi Ibu Imas: Keistimewaan Sambal Pedas, Tak Bikin Kantong Terkuras

Bandung adalah kota sejuta pesona. Selain terkenal karena keragaman destinasi wisata, Bandung juga masyhur dengan kulinernya. Kota ini selalu punya cara untuk memanjakan lidah para pengunjungnya. Beragam olahan masakan dihasilkan tanpa meninggalkan kearifan lokalnya, yakni sajian khas Sunda.

Apa yang ada dalam benak Anda saat mendengar restoran Sunda? Pastinya beragam, ya. Nah, dalam rubrik resensi kuliner edisi ini, penulis ingin mengajak untuk mengenal warung nasi Sunda yang tetap eksis dengan sajian tradisional khas, di tengah-tengah himpitan kuliner kekinian.

Warung Nasi Ibu Imas 81, sesuai namanya, terletak di Jalan Pungkur Nomor 81, Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Lokasinya tak jauh dari Alun-alun Kota Bandung, dapat ditempuh dalam sepuluh menit dengan berjalan kaki ke arah selatan, menyusuri Jalan Balonggede. Ada beberapa cabang dari warung nasi legendaris ini. Cabang di Jalan Pungkur inilah salah satunya.

Memasuki restoran ini, kita akan menjumpai sambutan khas Sunda: *wilujeng sumping* atau selamat datang dalam bahasa Indonesia. Saat melangkahkan kaki ke dalam restoran, mata kita langsung dimanjakan oleh gerobak penuh aneka lauk dan sayur tradisional yang kental khas Sunda. Lalu, yang tak pernah ketinggalan: tempe dan tahu goreng–orang Sunda terbiasa menggunakan frasa goreng tempe atau goreng tahu karena penggunaan kata "goreng" di belakang dalam bahasa Sunda artinya "jelek"). Ada pula bakwan jagung, daging empal/gepuk, aneka pepes, satai ati, satai ampela, satai paru yang lembut dan gurih, ayam bakar dengan rasa manis menggoda, nila goreng, *eh*, maksud penulis, goreng nila.

Restoran ini juga menyediakan makanan yang punya penggemar dan pembenci sama banyaknya: petai. Bagi yang suka mentah, Anda bisa

langsung melahapnya. Namun, untuk yang suka sensasi lain, Anda bisa mencoba petai bakar. Di sini, petai dimasak dengan cara direbus terlebih dahulu, baru kemudian digoreng tanpa dikupas kulit luarnya. Alhasil, ketika kita menikmati setiap gigitannya tidak tercium bau yang menyengat.

Ada lagi sebuah menu yang jarang ditemukan di tempat lain, yaitu selada goreng. Selada hijau segar yang biasa digunakan untuk lalapan, disajikan berbeda dengan digoreng garing. Renyah dan nikmat dimakan dengan nasi hangat. *Oiya*, jangan pernah melewatkan untuk memesan sayur *asem*, ya.

Sudah semua? Belum, tentu saja. Coba baca lagi judul artikel ini, ada apa di sana? Ya, betul. Sambal! Sambal di Warung Nasi Ibu Imas ini tiada duanya, *lho*. Eloknya lagi, harga yang harus Anda bayar sungguh ramah di kantong.

Banyak kuliner yang bisa Anda nikmati di Bandung. Namun, Anda tidak boleh melewatkan rasa yang tersaji di Warung Nasi Ibu Imas. Sepiring nasi hangat, lalapan segar, sayur dan lauk khas Sunda yang akan membuat Anda selalu ingin kembali ke sana. Simfoni masakan yang digubah secara paripurna.

Penulis : Elizabeth Rosalia
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Raya and The Last Dragon, Sebuah Kisah Naga yang Tak Biasa

Raya and The Last Dragon merupakan film animasi ke-59 garapan rumah produksi Walt Disney Animation Studios. Pada film yang rilis awal Maret 2021 ini, untuk pertama kalinya Disney menampilkan pahlawan perempuan dari Asia Tenggara, lengkap dengan sentuhan berbagai budayanya. Budaya dan mitos yang ditampilkan di sepanjang film merupakan hasil riset pembuat film selama beberapa tahun di enam negara, yaitu Indonesia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos dan Singapura.

Film ini berkisah tentang seorang putri raja bernama Raya yang berusaha menyatukan kembali Kumandra, sebuah negeri yang indah dan tenteram saat masih dijaga oleh para naga. Naga dipercaya sebagai makhluk ajaib yang mampu menyediakan air, hujan, dan kedamaian. Namun, semua berubah ketika roh jahat yang disebut Druun datang menyerang. Semua orang yang dilewati Druun akan berubah menjadi batu.

Para naga penjaga Kumandra berjuang sebisa mungkin untuk melawan Druun. Namun, Druun memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga sulit untuk dikalahkan. Akhirnya, para naga pelindung menyatukan kekuatan sihir sehingga terbentuklah bola ajaib yang mampu memusnahkan Druun. Sayangnya, ketika naga pelindung menyatukan kekuatan dan membentuk bola ajaib, mereka justru berubah menjadi batu.

Semua yang menjadi batu berhasil kembali, tetapi tidak dengan para naga pelindung. Yang tersisa hanyalah bola ajaib yang dihasilkan para naga saat melawan Druun. Bola ajaib inilah yang menjadi penyebab terpecahnya Kumandra. Keserakahan manusia yang menginginkan sisa sihir dari naga terakhir menciptakan permusuhan dan menyebabkan terbentuknya beberapa suku baru, yakni Fang, Heart, Spine, Talon, dan Tail.

Bola ajaib tersebut disimpan oleh suku Heart selama 500 tahun. Suku yang dipimpin Chief Benja ini dikisahkan memiliki tanah subur sehingga menghasilkan banyak hasil panen. Suatu hari, Chief Benja memiliki gagasan untuk menyatukan kembali semua suku yang terpecah belah. Dengan mengadakan acara pertemuan antarsuku, ia berharap dapat menunjukkan kepada Raya bahwa tidak mustahil menyatukan kembali semua suku

menjadi Kumandra. Celakanya, sebuah rencana jahat menyebabkan bola ajaib rusak. Ia pecah menjadi beberapa keping. Hal itu membuat Druun kembali muncul dan menyebabkan banyak orang berubah menjadi batu, termasuk sang raja. Situasi tersebut memaksa Raya bertualang bersama sahabatnya, Tuk-Tuk, untuk menemukan dan menyatukan kembali kepingan bola ajaib yang hilang.

Dengan kegigihannya, Raya berhasil bertemu dengan sang naga pelindung terakhir yang bernama Sisu. Dalam perjalanannya mencari kepingan bola ajaib, Raya dan Sisu menemui banyak rintangan. Keberanian Raya membuat satu per satu kepingan bola ajaib bisa dikumpulkan. Setiap satu kepingan berhasil ditemukan maka pada saat yang sama Sisu akan bertambah kuat. Kekuatan tersebut sesuai dengan kekuatan saudara Sisu ketika membuat bola ajaib di masa lalu. Ketika semua kepingan akhirnya terkumpul, Raya dan teman-teman yang ia temui ketika melakukan perjalanan berhasil memusnahkan Druun. Semua orang, juga naga pelindung yang menjadi batu berubah seperti sedia kala. Akhirnya, Raya, Sisu, dan teman-temannya berhasil menyelesaikan misi untuk kembali mengembalikan Kumandra.

Foto: google.com

Saya suka bagian awal cerita, ketika penonton bertemu Chief Benja dan berkenalan dengan Raya. Selain itu, menurut saya penyebab dari terpecahnya Kumandra serta latar belakang masalah terbentuk dengan cepat dan menarik. Kemudian, tidak seperti dongeng-dongeng lainnya yang selalu menampilkan naga sebagai makhluk tangguh, penggambaran Sisu sebagai sosok yang lucu dan memiliki *image* berbeda dengan naga pada umumnya juga membuat saya takjub. Sebuah hal unik dan jarang saya temui ketika menonton film yang menampilkan sosok naga. Sosok Raya yang berani dan jago bela diri namun tetap anggun membuat *stereotype* putri raja yang biasanya lemah menjadi berubah. Prinsip Raya yang tidak mudah goyah dan rasa cinta yang begitu besar kepada sang ayah juga memberikan nyawa untuk film ini.

Namun, ternyata alur cerita menemukan kepingan bola ajaib serta *the last dragon* itu membawa saya masuk ke dalam jalur lurus dan cepat di dalam misi seorang Raya. Saya merasa bahwa masuknya berbagai macam karakter pendukung yang berulang kali sukses mencuri perhatian penonton seharusnya tidak perlu dilakukan demi menjaga "kekuatan" Raya dan Sisu. Berada di jalur lurus dan cepat untuk menyelesaikan misi membuat sosok Raya tidak memiliki ruang ekstra untuk menunjukkan *empowerment* yang ia punya karena banyaknya karakter pendukung yang mendominasi cerita. Memang di bagian akhir ada momen yang tersedia bagi Raya untuk membuat *"statement"*, tetapi sayangnya *heart and soul* yang tampil di sana tidak luar biasa.

Overall, Raya and the Last Dragon adalah film yang memuaskan. Film yang dapat ditonton berbagai kalangan usia ini menyajikan visual yang luar biasa detail dan indah. Banyak nilai moral yang dapat dipetik juga dari film animasi ini. Tontonan yang tidak hanya sekadar menghibur mata, tetapi juga mampu menambah *insight* baru para penontonnya. Sebuah film animasi yang layak dijadikan *watchlist* untuk ditonton bersama keluarga. Ada satu kutipan dari *Raya and the Last Dragon* yang sangat membekas di hati saya. *"It may feel impossible, but sometimes, you just have to take the first step, even before you're ready."*

Penulis : Wenny Ferrari Adhisti
Editor : Tobagus Manshor Makmun
Foto : www.bing.com

Foto: google.com

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan 12760
Telp. : (021) 79194831, 79194911 Fax. (021) 79194852
Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak 1500200
Email : kpp.081@pajak.go.id
Website : www.https:pajak.go.id
www.https://pipamigas.net/migazine/